

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
HALAMAN : 3 TAUN 2004

Hadapi Peningkatan Harga Minyak

Purnomo:Gunakan BBM Dan Listrik Lebih Hemat

JAKARTA (Suara Karya) : Dalam menghadapi peningkatan harga minyak mentah saat ini, pemerintah menghimbau agar pelaku usaha dan masyarakat dapat menggunakan energi khususnya BBM dan listrik secara lebih hemat, selain mengupayakan agar minyak bumi produksi Indonesia semaksimal mungkin dapat diproses di kilang dalam negeri.

Meskipun demikian, penggunaan minyak produksi dalam negeri tersebut harus tetap memperhatikan spesifikasi kilang-kilang minyak dalam negeri dan kontrak jangka panjang yang sudah ada antara produsen di Indonesia dengan pembe-

li luar negeri. Demikian disampaikan Menteri Purnomo Yusgiantoro, masih seputar dampak kenaikan harga minyak bagi Indonesia.

Menurut Menteri Purnomo, saat ini OPEC terus melakukan berbagai langkah dalam turut menstabilkan harga minyak mentah dunia. OPEC (termasuk Irak) saat ini sudah berproduksi sekitar 30 juta barel per hari atau sekitar 4 juta barel diatas kuota (kuota per 1 Agustus 2004: 26 juta barel per hari).

Namun demikian, upaya OPEC ini terkendala dengan faktor-faktor yang bersifat nonfundamental (ketegangan di Timur Tengah dan ancaman terorisme, ketatnya standard lingkungan produk bensin di AS yang menyebabkan terjadinya gangguan distribusi) serta kasus yang menimpa perusahaan minyak Rusia, Yukos).

Menteri Purnomo juga mengharapkan agar pelaku usaha segera melakukan diversifikasi sumber energi dengan menggunakan gas bumi,

batubara dan energi-energi lainnya sebagai substitusi BBM.

Dibagian lain, Purnomo mengatakan, kontrak jual beli gas antara PGN dengan ConocoPhillips yang ditandatangani awal Agustus lalu merupakan kontrak terbesar untuk pemakaian gas domestik dengan total volume kontrak sebesar 2,3 Triliun kaki kubik (TCF) dengan nilai pembelian gas sebesar 4,3 miliar dolar AS selama 17 tahun yang dimulai pada tahun 2007.

Menurut Purnomo, pemanfaatan gas bumi merupakan salah satu pilihan utama dalam kebijakan diversifikasi energi terlebih pada situasi harga minyak yang sangat tinggi, peranan gas bumi harus lebih ditingkatkan dan dipercepat pemakaiannya selain sebagai sumber penerimaan negara yang cukup besar juga untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM.

Kerjasama jual beli gas bumi ini juga, katanya, akan mendorong investasi di sisi hulu

(upstream), antara (midstream) dan hilir (downstream) sekitar 1,1 miliar dolar AS hingga tahun 2007 (dengan jumlah investasi asing mencapai 500 juta dolar AS).

Jumlah ini tentu merupakan nilai investasi yang cukup besar untuk pembangunan daerah khususnya di Sumatera Selatan dan Jawa Barat. Apabila pembangunan infrastruktur proyek South Sumatera-West Java Phase I dan II diperhitungkan, maka total investasi akan mencapai USD 4 miliar.

Menurut catatan, manfaat ekonomis dari jual beli gas ini diperkirakan sebesar 12 miliar dolar AS yang terdiri atas pendapatan pemerintah dari bagi hasil (40 persen) sebesar 1,8 miliar dolar AS (setelah memperhitungkan cost recovery) selama 17 tahun. Pemerintah juga akan mendapat dividen dari operasional PGN sebesar 1,4 miliar dolar AS selama 17 tahun.

Dijelaskan oleh Purnomo, pemanfaatan gas

domestik ini juga akan mengurangi impor BBM sebesar 3.830 kilo liter per tahun sehingga akan mengurangi pengeluaran untuk subsidi sebesar 7,4 miliar dolar AS.

Sementara dari sisi PGN, ungkapnya, keuntungan PGN akan meningkat 2 hingga 3 kali lipat pada tahun 2007 yang berasal dari tambahan volume gas PGN sebesar 400 mmscfd (juta standar kaki kubik per hari) sehingga total volume gas PGN pada tahun 2007 akan meningkat menjadi 680 mmscfd.

Menurut Menteri Purnomo, aspek lain yang juga tidak kalah pentingnya dari jual beli gas ini adalah percepatan pertumbuhan industri di Sumatra dan Jawa. Hal ini dipicu oleh peningkatan daya saing industri (ketersediaan energi bersih dengan harga lebih murah dibanding BBM) yang pada gilirannya juga akan membuka berbagai peluang usaha dan peluang kerja bagi masyarakat. (CW-1)

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input checked="" type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM										
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 10											
											TAHUN 2004

Stok BBM Nasional

Purnomo Nyatakan Persediaan BBM Nasional Masih Terkendali

Jakarta, NERACA

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MESDM) Purnomo Yusgianto menyatakan, persediaan bahan bakar minyak (BBM) di seluruh instalasi/depot milik PT (Persero) Pertamina secara umum dalam keadaan terkendali. Persediaan pada menjelang perayaan hari kemerdekaan Agustus 2004 lalu cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 21,8 hari konsumsi dan mengalami kenaikan dibandingkan persediaan pada tanggal 3 Agustus 2004. "Secara umum, persediaan BBM di seluruh instalasi dan depot Pertamina dalam keadaan terkendali," kata Purnomo, di Jakarta, kemarin.

Dijelaskan, pada Juli, *Daily Off Take* (DOT) BBM mencapai 168.671 Kilo Liter (KL)/ hari. Sedangkan persediaan pada 20 Juli 2004 mencapai 3.369.031 KL dan pada 27 Juli 2004 mencapai 3.578.712 KL atau cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 21,2 hari.

Posisi stok BBM pada 3 Agustus 2004 mencapai 3.737.370 KL atau cukup untuk 21,7 hari konsumsi. "Sedangkan posisi pada 9 Agustus 2004 mencapai 3.753.652 atau naik sebesar 16.282 KL atau cukup untuk memenuhi kebutuhan

an selama 21,8 hari konsumsi dengan DOT sebesar 172.100 KL/hari," tuturnya.

Seperti diketahui, untuk memenuhi kebutuhan BBM nasional, Indonesia mengimpor BBM dari luar negeri. Dengan kata lain, walaupun masuk dalam deretan negara-negara pengekspor minyak OPEC, tetapi Indonesia juga menjadi negara pengimpor minyak. Sedikitnya US\$ 500 juta tiap bulan Indonesia harus merogoh kocek untuk impor BBM.

Menurut perkiraan sebagaimana pernah dituturkan Direktur Hilir Pertamina yang saat itu masih dijabat Harry Purnomo, apabila keadaan tak berubah Indonesia akan menjadi negara pengimpor terbesar bahan bakar minyak. "Akibatnya, ketahanan nasional menjadi sangat rentan," katanya dalam sebuah kesempatan.

Ia menjelaskan, untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri yang setiap hari hampir mencapai 1,5 juta barrel sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 1,050 juta barrel, Indonesia harus mengeluarkan dana sekitar US\$ 500 juta per bulan. Untuk mengatasinya, ia pernah mengusulkan, solusi terbaik ada-

lah dengan membangun kilang baru BBM. "Pembangunan kilang baru BBM merupakan solusi terbaik mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM sekaligus mengurangi devisa."

Dalam kaitan itu ia juga berharap ada pihak swasta yang berinisiatif membangun kilang BBM. Pertamina sendiri akan terbuka dan siap bekerja sama dengan investor mana pun yang hendak menanamkan modalnya untuk membangun kilang BBM.

Namun di tengah tidak mencukupi kebutuhan BBM dalam negeri, diakui Harry (waktu itu) masih terjadi penyelewengan BBM. Beberapa pelaku berhasil ditangkap. Beberapa waktu lalu, Pertamina sendiri telah memberikan sanksi tegas kepada pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan kegiatan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di antaranya pengusaha SPBU No. 64.701.06, Banjarmasin.

Berdasarkan hasil pengecekan dan penelitian petugas Unit Pemasaran VI cabang Banjarmasin periode Maret-Juni 2004, SPBU yang berlokasi di jalan Lingkar

Selatan, Banjarmasin itu terbukti melakukan pelanggaran dengan menyalurkan minyak solar dari unit pompa langsung ke mobil tangki untuk kemudian disalurkan ke industri.

Tindakan penyelewengan BBM untuk sektor transportasi ke sektor industri seperti yang dilakukan SPBU itu bertentangan dengan aturan yang tertera pada Surat Perjanjian Penunjukan Pengelolaan dan Penggunaan SPBU. Pada pasal 1 ayat 2 surat perjanjian itu disebutkan bahwa: "...tujuan diadakannya SPBU yaitu untuk melayani kebutuhan masyarakat pemakai kendaraan bermotor".

Sehubungan dengan pelanggaran ini, pasokan BBM terhadap SPBU tersebut telah dihentikan selama satu bulan terhitung mulai tanggal 25 Juni 2004. Selain itu, kepada pengelola SPBU juga dikenakan sanksi pengembalian ongkos angkut minyak solar, margin penjualan minyak solar dan selisih harga minyak solar untuk industri. Kepada pengusaha SPBU tersebut selanjutnya juga akan dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Usaha sesuai dengan isi surat perjanjian antara Pertamina dengan pengusaha itu. (31)

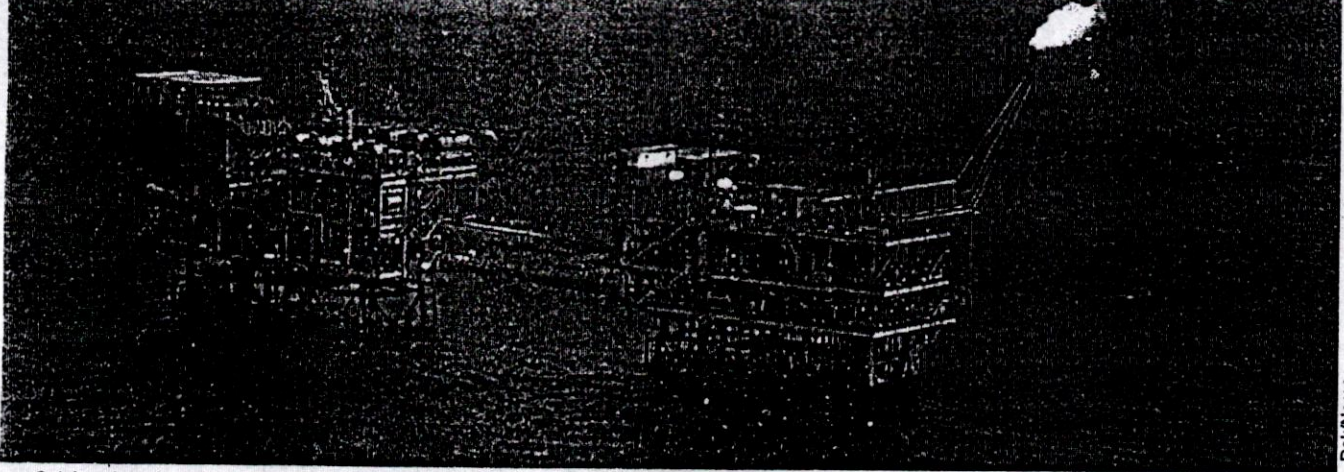
MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input checked="" type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>
---	---

KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
--	---

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN: 10 TAHUN 2004



Selain sebagai sumber penerimaan negara yang cukup besar, peranan gas bumi dinilai harus lebih ditingkatkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) selama ini. Cadangan gas bumi Indonesia saat ini diperkirakan sebesar 134,0 TSCF yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Natuna, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Peranan Gas Bumi Harus Lebih Ditingkatkan untuk Kurangi Ketergantungan BBM

Jakarta, NERACA
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MESDM) Purnomo Yusgiantoro menekankan agar peranan gas bumi harus lebih ditingkatkan dan dipercepat pemakaiannya selain sebagai sumber penerimaan negara yang cukup besar juga untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM).
"Pemanfaatan gas bumi merupakan salah satu pilihan utama dalam kebijakan diversifikasi energi terlebih pada situasi harga minyak yang sangat tinggi seperti sekarang," kata Purnomo, di Jakarta, kemarin.
Dalam kaitan itu menurut Purnomo, kontrak jual beli gas antara PT (Persero) Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan Conoco-Phillips yang telah ditandatangani awal Agustus 2004 lalu merupakan kontrak terbesar untuk pemakaian gas domestik dengan total volume kontrak sebesar 2,3 TCF dengan nilai pembelian gas sebesar US\$ 4,3 miliar selama 17 tahun yang dimulai pada 2007.
"Kerjasama jual beli gas bumi ini juga akan mendorong investasi di sisi hulu (substream), antara

(midstream) dan hilir (downstream) sekitar US\$ 1,1 miliar hingga 2007 (dengan jumlah investasi asing mencapai US\$ 500 juta. Jumlah ini tentu merupakan nilai investasi yang cukup besar untuk pembangunan daerah khususnya di Sumatera Selatan dan Jawa Barat. Apabila pembangunan infrastruktur proyek South Sumatera-West Java Phase I dan II diperhitungkan, maka total investasi akan mencapai US\$ 4 miliar," tutur Purnomo.
Ia menjelaskan, manfaat ekonomis dari jual beli gas ini diperkirakan sebesar US\$ 12 miliar yang terdiri atas pendapatan pemerintah dari bagi hasil (40%) sebesar US\$ 1,8 miliar (setelah memperhitungkan cost recovery) selama 17 tahun. Pemerintah juga akan mendapat dividen dari operasional PGN sebesar US\$ 1,4 miliar selama 17 tahun.
"Pemanfaatan gas domestik ini juga sekaligus akan mengurangi impor BBM sebesar 3.830 kilo liter per tahun sehingga akan mengurangi pengeluaran untuk subsidi sebesar US\$ 7,4 miliar," kata Purnomo.
Dia juga mengungkapkan, dari sisi PGN sendiri, keuntungan PGN

akan meningkat 2 hingga 3 kali lipat pada 2007 yang berasal dari tambahan volume gas PGN sebesar 400 mmscfd (juta standar kaki kubik per hari) sehingga total volume gas PGN pada 2007 akan meningkat menjadi 680 mmscfd.
Menurut Purnomo, aspek lain yang juga tidak kalah pentingnya dari jual beli gas ini adalah percepatan pertumbuhan industri di Sumsel dan Jabar. "Hal ini dipicu oleh peningkatan daya saing industri (ketersediaan energi bersih dengan harga lebih murah dibanding BBM) yang pada gilirannya juga akan membuka berbagai peluang usaha dan peluang kerja bagi masyarakat," ucapnya.
Sebagaimana diketahui, cadangan gas bumi Indonesia saat ini diperkirakan sebesar 134,0 TSCF yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Natuna, Sulawesi Selatan, dan Papua. Sementara produksi gas tercatat sebesar 8,6 miliar kaki kubik per hari, dimana 6,6 miliar kaki kubik dari produksi tersebut digunakan untuk ekspor dan sisanya sebesar 2,0 miliar kaki kubik untuk memenuhi kebutuhan

dalam negeri yaitu untuk keperluan fertilizers, refinery, petrochemicals, LPG domestik, PGN, PLN, dan industri lainnya.
Penerimaan negara sendiri dari gas bumi rata-rata sebesar 10,2% dari total penerimaan negara. Sebesar 80% dari jumlah tersebut berasal dari ekspor.
Industri gas alam di Indonesia dimulai pada 1974 oleh PGN untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, komersial, dan industri. Dalam perkembangannya, pada 1984 kebutuhan gas dalam negeri meningkat sangat pesat menjadi lebih dari lima kalinya dibandingkan tahun 1974.
Seperti halnya dengan minyak, pada awalnya industri gas nasional menempatkan PGN sebagai satu-satunya pemain di bisnis ini. Namun, pola ini tidak dapat terus dipertahankan, karena sebagaimana halnya dengan industri pertambangan lainnya, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi gas bumi tergolong kegiatan yang padat modal dan padat teknologi serta beresiko tinggi. Pemerintah sendiri tidak memiliki dana untuk melakukan pengembangan lapangan gas yang memiliki tingkat resiko tinggi tersebut. (31)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2004

Tajuk Rencana

Dirut Baru Pertamina

Pelantikan Widya Purnama sebagai Direktur Utama Pertamina menggantikan Ariffi Nawawi baru-baru ini, agaknya bersifat agak khusus. Setelah ada desas-desus mengenai penggantian pucuk pimpinan BUMN yang mengatur penyediaan serta distribusi bahan bakar minyak itu, dan kian kencang di akhir Juli, nama Harry Purnomo, Direktur Hilir Pertamina santer disebut sebagai calon kuat pengganti Ariffi. Kabarnya Harry dekat dengan sejumlah petinggi negeri ini, sehingga sebagian orang yakin dia akan naik memimpin Pertamina. Tetapi, dua hari menjelang pergantian, nama Harry tenggelam dan muncullah Widya Purnama.

Pencalonan Widya Purnama bagi sebagian kalangan dinilai wajar. Orang nomor satu di PT Indosat itu, selain dinilai cukup sukses melaksanakan tugasnya, konon juga punya akses yang baik pada pengambil keputusan. Bagi Pertamina pun "datangnya orang luar" sebagai pucuk pimpinan tidak lagi dianggap aneh. Piet Haryono dan A. R. Ramly, dan Baihaki Hakim bukanlah orang yang berasal dari dalam Pertamina. Sebelum di Pertamina, Piet adalah Direktur Anggaran di Departemen Keuangan. Ramly, yang pernah bertugas di Bakin, sebelum menjadi Dirut Pertamina, pernah menjadi Dirut PT Timah. Baihaki Hakim, meski sepanjang kariernya berurusan dengan minyak, juga bukan orang Pertamina. Dia dari PT Caltex Pasific Indonesia.

Penggantian pejabat puncak di Pertamina memang sempat agak mengagetkan, karena Ariffi Nawawi, baru 11 bulan menduduki jabatan itu sejak menggantikan seniornya Baihaki Hakim. Sebagian orang mengaitkan lengsernya Ariffi dengan lambannya penanganan sejumlah masalah, mulai kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), kelangkaan BBM, masalah subsidi, hingga gugatan Karaha Bodas Company (KBC) yang mewajibkan Pertamina membayar klaim US\$ 299 juta

kepada perusahaan asal Amerika Serikat itu. Konon, sejumlah persoalan yang menumpuk itu, tidak bisa diselesaikan secara mulus seperti yang diharapkan.

Pergantian itu sedikit-tidaknya membangkitkan kembali harapan bahwa kasus KKN dan beberapa persoalan di tubuh Pertamina bakal tertangani secara baik, apalagi Widya Purnama sejauh ini dikenal jujur, bersih, profesional, dan cukup disegani. Pada hari-hari pertama di Pertamina dia menyatakan menolak klaim KBC yang dia nilai sebagai proyek yang beraroma KKN. Rasanya, belum ada satu pejabat pun, baik di Pertamina maupun di pemerintahan, yang secara resmi menyatakan penolakan terhadap klaim yang telah memiliki kekuatan hukum internasional itu, kecuali Widya Purnama. Untuk tekadnya itu, Widya Purnama berani mundur jika misalnya Pertamina atau pemerintah kelak di masa jabatannya, memutuskan membayar klaim tersebut.

Kendati demikian, juga ada pendapat yang meragukan kemampuan pejabat baru ini. Tugas memberantas KKN di Pertamina bukan pekerjaan yang ringan. Untuk menuntaskannya dibutuhkan dukungan penuh dari anggota dewan direksi lainnya, jajaran staf di bawahnya, dan tentu juga kepolisian serta kejaksaan. Tugas berat lainnya, menyangkut keuangan. Sejak Nopember tahun lalu —boleh jadi kini belum tertangani tuntas— BUMN itu dihadapkan pada problem keuangan yang serius, akibat kelambanan pemerintah mencairkan subsidi BBM. Subsidi yang belum dikucurkan sempat mencapai Rp 12 triliun. Yang dikucurkan sampai sekarang kabarnya kurang dari separuhnya. Pertamina pun punya kewajiban membayar utang kepada pemerintah.

Seluruh tugas berat itu membutuhkan penanganan yang tidak bisa setengah-setengah. Tanpa kerjasama harmonis dan dukungan penuh dari seluruh personel Pertamina, rasanya mustahil Widya Purnama —yang suka bicara ceplas ceplos— sanggup mewujudkan obsesinya mengikis habis KKN dan mengantarkan BUMN ini menjadi perusahaan yang dikenal di forum internasional. Kita lihat saja.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

TAHUN 2004

'Dirut Pertamina agar benahi manajemen'

JAKARTA (Bisnis): Lembaga swadaya masyarakat peduli migas meminta direksi baru PT Pertamina membenahi manajemen perusahaan untuk menekan penyelewengan jabatan yang berpotensi merugikan perusahaan itu.

Loudewyk Amung, Ketua Umum Forum Solidaritas Masyarakat Peduli Migas (Fortas-MPM), mengatakan pihaknya menyambut program 100 hari yang diterapkan Widya Purnama, Dirut Pertamina, untuk mengevaluasi kinerja BUMN tersebut.

"Dirut baru Pertamina harus bisa membenahi

manajemen perusahaan untuk menghilangkan 'tikus-tikus' yang merusak. Bukan gudangnya yang dibakar, tapi tikusnya harus dicari dengan 100 hari itu," katanya, kemarin.

Pejabat baru itu, ujarnya, harus dapat menuntaskan upaya yang ditempuhnya, kendati latar belakang Widya Purnama tidak berasal dari lingkungan usaha hilir minyak dan gas.

Menurut dia, Pertamina lebih membutuhkan direktur yang dapat memimpin dan mengatur perusahaan. (06)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2004

Harga Minyak dan APBN

BELANJA maupun penerimaan pada APBN yang sudah dibacakan Presiden Megawati Soekarnoputri di depan parlemen pekan lalu didasarkan pada asumsi yang sudah tidak relevan. Sangat disayangkan bahwa anggaran tersebut diloloskan tanpa antisipasi perkembangan ekonomi dunia, khususnya harga minyak. Namun, nasi sudah jadi bubur. Dan kini, pemerintah mau tak mau harus merevisi anggaran, meskipun hal tersebut harus dilakukan tanpa membawa implikasi yang menyulitkan publik.

Seperti diketahui, asumsi harga minyak dalam APBN 2004 US\$ 22 per barel. Sementara itu, untuk RAPBN 2005 US\$ 24 per barel. Padahal, harga minyak mentah dunia kini membung tinggi lebih dari US\$ 40 per barel. Jika asumsi harus disesuaikan dengan perkembangan baru, beberapa pos anggaran harus pula dirombak untuk mencapai keseimbangan pendapatan dan pengeluaran negara.

Dengan asumsi lama, misalnya, pemerintah telah menganggarkan Rp 14,5 triliun untuk subsidi minyak sepanjang tahun ini dan Rp 21 triliun untuk anggaran 2005. Dengan asumsi baru, jumlah subsidi yang dikeluarkan pemerintah jelas akan membengkak hampir dua kali lipatnya.

Ada beberapa skenario untuk mengatasi hal tersebut. Pertama adalah memangkas subsidi. Melihat skenario jangka panjang bahwa harga minyak masih tinggi, kebijakan pemotongan subsidi minyak ini akan menguntungkan dari sudut pandang pemerintah. Indonesia sudah kian tergantung pada minyak impor, sehingga pemerintah harus mengeluarkan subsidi yang makin hari makin besar, hingga mungkin di luar kemampuan pemerin-

tah untuk mengimbangnya dengan peningkatan penerimaan.

Tapi, pilihan ini berisiko. Pemerintah nanti—Megawati atau Susilo Bambang Yudhoyono—akan enggan melakukan kebijakan yang tidak populer tersebut. Kebijakan memangkas subsidi memiliki arti yang jelas bagi rakyat: hidup mereka akan berat, karena tidak hanya harga minyak akan naik, tapi juga naiknya harga seluruh barang kebutuhan pokok. Pemotongan subsidi minyak akan menjadi "bunuh diri politik" bagi siapa pun yang menang dalam pemilihan presiden putaran kedua.

Pilihan lain adalah memperbesar penerimaan untuk mengkompensasi subsidi. Dalam APBN mendatang, pajak akan merupakan komponen penerimaan yang paling diharapkan pemerintah. Ketimbang membebani rakyat dengan kenaikan harga, pemerintah tampaknya harus mengefektifkan penerimaan pajak. Jika manajemen dan penegakan hukum yang berkaitan dengan pajak diperbaiki, pemerintah bisa memperbesar penerimaan pajak, bahkan tanpa harus menaikkan pajak. Kuncinya adalah pemerintahan yang bersih.

Masih ada pilihan lagi sebenarnya: memperkecil pengeluaran untuk pembayaran utang. Pada 2004, anggaran untuk pembayaran bunga utang negara sekitar Rp 64 triliun. Rasio utang luar negeri pemerintah terhadap PDB pada 2005 masih 55 persen. Angka itu turun dari 2004 sebesar 60,1 persen, tapi masih jauh lebih tinggi dibanding rasio standar yang dipatok PBB 20-30 persen. Pengurangan ini hanya bisa dicapai jika pemerintah menggiatkan negosiasi pengurangan atau bahkan penghapusan utang. Ini tidak sulit jika kita mau menelan kebanggaan sebagai "negeri yang paling patuh membayar utang".

Apa pun pilihannya, situasi ini harus dihadapi presiden baru. Bukan situasi yang mudah.

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : 1

TAHUN 2004

Asumsi harga minyak US\$36/barel

JAKARTA (Bisnis): Pemerintah merevisi patokan harga minyak dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2004 menjadi US\$36 per barel menyusul lonjakan harga minyak dunia yang sempat menyentuh level US\$50 per barel.

Perubahan patokan harga minyak dalam APBN-P dari semula US\$22 per barel itu menyebabkan subsidi BBM membengkak menjadi Rp63 triliun dari target awal Rp14,5 triliun, atau terdapat tambahan subsidi Rp48,5 triliun.

Kendati subsidi BBM meningkat tajam, Menteri Keuangan Boediono mengatakan revisi itu cuma menambah defisit anggaran dari 1,2% dari PDB menjadi 1,3% dari PDB.

"Asumsi minyak dalam prognosa sekitar US\$36 per barel, tapi intinya defisitnya naik sedikit menjadi 1,3% dari PDB, tapi nominalnya lihat saja nanti [dalam pem-

bahasan dengan Panitia Anggaran DPR]," katanya sesuai *Pandangan Fraksi terhadap RAPBN 2005 dan Nota Keuangan* di Jakarta kemarin.

Pemerintah, tutur Boediono, masih memiliki sumber pendanaan lain untuk membiayai defisit anggaran tersebut a.l. dari penerbitan surat utang negara (SUN), penjualan aset negara di bawah PT Perusahaan Pengelola Aset, dan setoran dari BPPN.

Di atas prognosa

Patokan harga minyak dalam APBN-P itu lebih tinggi dari prognosa pemerintah yang memperkirakan sekitar US\$34 per barel sebagai rata-rata dari realisasi semester I sebesar US\$32,67 per barel dan prediksi semester II sekitar US\$35,33 per barel.

Namun demikian, penentuan asumsi baru harga minyak untuk APBN perubahan 2004 itu masih jauh di

bawah level harga minyak dunia saat ini yang sempat menyentuh US\$50/barel.

Menkeu melanjutkan asumsi APBN-Plainnya juga berubah seperti inflasi dari 6,5% menjadi 7%, kurs rupiah dari Rp8.600/US\$ menjadi Rp8.900/US\$, dan produksi minyak dikurangi menjadi 1.072 juta barel per hari dari patokan awal 1.150 juta barel per hari.

Pada kesempatan itu, Pjs. Ketua Badan Analisa Fiskal Depkeu Anggito Abimanyu mengatakan patokan harga minyak US\$36 per barel itu diambil agar kebijakan fiskal yang disusun pemerintah lebih realistis dalam merepons perkembangan perekonomian nasional dan internasional belakangan ini.

Meski begitu, dia mengakui subsidi akan membengkak, karena Kabinet Gotong Royong tidak akan menaikkan harga BBM di masyarakat.

Hanya saja, Anggito tidak menjamin pemerintah hasil Pemilu 2004 akan mempertahankan harga BBM saat ini.

Proyeksi harga minyak dunia lebih tinggi dari realisasi semester I didorong oleh kekhawatiran terhadap pasokan komoditas itu akibat faktor keamanan di Irak yang belum kondusif, serta kenaikan permintaan dari China dan kemerosotan cadangan minyak AS.

Boediono mengakui lonjakan harga minyak akan mempengaruhi kapasitas perekonomian Indonesia.

Namun, katanya, pemerintah tetap optimistis perubahan lingkungan eksternal seperti itu tidak akan mampu menahan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,8% tahun ini.

"Ada pengaruhnya sedikit [kenaikan harga minyak dunia], tapi pertumbuhan ekonomi tetap 4,8%." (luz)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 **25** 26 27 28 29 30 31

PALAMAN: 4

TAHUN 2004

Asumsi Harga Minyak Diusulkan 36 Dolar AS

Asumsi inflasi, SBI, dan nilai tukar rupiah juga diubah.

JAKARTA — Melambungnya harga minyak dunia membuat pemerintah harus merevisi asumsi harga jual minyak yang dipatok dalam APBN 2004. Pemerintah mengusulkan harga jual minyak dinaikkan dari 22 dolar AS per barel menjadi 36 dolar AS per barel dalam APBN Perubahan (APBN-P) yang disampaikan ke DPR, Selasa (24/8).

Selain asumsi harga jual minyak, pemerintah juga mengusulkan perubahan asumsi lainnya seperti inflasi, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tiga bulan, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Demikian pula dengan target defisit anggaran yang sedikit bertambah dari perkiraan semula 1,2 persen menjadi 1,3 persen.

"Kita sudah menyampaikan RUU APBN-P ke dewan, di situ ada angka-angka asumsinya, yang sangat menonjol asumsi harga minyak yang menjadi 36 dolar AS per barel," kata Menteri Keuangan, Boediono, usai rapat paripurna DPR di Jakarta, Selasa (24/8).

Semula asumsi inflasi yang ditetapkan di awal tahun lalu sebesar 6,5 persen, namun kini diubah menjadi tujuh persen. Lalu, asumsi SBI diubah dari 8,5 persen menjadi 7,6 persen dan asumsi nilai tukar rupiah diperbaiki dari Rp 8.600 per

dolar AS menjadi Rp 8.900 per dolar AS. Sementara target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,8 persen serta produksi minyak sebesar 1,072 juta barel per hari, tetap dipertahankan.

Akibat dinaikkannya harga jual minyak, subsidi BBM yang harus ditanggung pemerintah ikut membengkak dan defisit anggaran bertambah besar. Kendati demikian, Menkeu tidak khawatir menghadapi tambahan defisit itu dengan alasan pembiayaan anggaran masih memadai. "Dengan asumsi harga minyak seperti itu, kita usahakan *bottom line* defisitnya yang sangat mempengaruhi utang dan pembiayaan," ujarnya.

Menurut Boediono, pemerintah masih memiliki sumber-sumber pembiayaan yang cukup untuk menutupi kekurangan anggaran. Ia menyebutkan pemerintah masih bisa mengandalkan pembiayaan dari penjualan aset PPA, setoran BPPN, dan penerbitan Surat Utang Negara (SUN).

Kepala Badan Analisa Fiskal (BAF) Departemen Keuangan, Anggito Abimanyu, menambahkan subsidi BBM yang harus ditanggung pemerintah tahun ini jumlahnya melonjak menjadi sekitar Rp 63 triliun. Semula subsidi BBM ini hanya dianggarkan Rp 14,5 triliun. "Kita sudah sesuaikan asumsi harga minyak dengan harga yang realistis," ujarnya.

Saat ini harga jual minyak mentah dunia sudah menembus angka 45 dolar AS per barel. Anggito mengakui tingginya harga minyak ini membawa konsekuensi subsidi BBM yang ikut melangit.

Realistis

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Aslim Tadjuddin, mengatakan asumsi nilai tukar rupiah yang diusulkan pemerintah sebesar Rp 8.900 per dolar AS, dalam APBN-P sudah realistis. Bank Indonesia berjanji akan mengarahkan rupiah ke asumsi yang sudah ditetapkan itu. "Kenaikan suku bunga The Fed sudah di-*price in* oleh pasar kita, saya menganggap kurs Rp 8.900 per dolar AS itu cukup realistis," katanya di Jakarta, Selasa (24/8). ■ djo

Perubahan Asumsi APBN

Indikator	APBN 2004	APBN Perubahan
Harga minyak (per barel)	22 dolar	36 dolar
Inflasi	6,5 persen	7,0 persen
Sertifikat Bank Indonesia	8,5 persen	7,6 persen
Nilai tukar rupiah (per dolar)	8.600	8.900

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input checked="" type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 4 TAHUN 2004	

DPR Minta Pemerintah Tinjau Asumsi Harga Minyak di RAPBN

JAKARTA - Sebagian besar fraksi-fraksi di DPR menyoroti asumsi harga minyak yang diajukan pemerintah dalam RAPBN 2005. Mereka pada dasarnya meminta pemerintah untuk meninjau kembali asumsi harga minyak yang ditetapkan sebesar US\$ 24 per barel, karena dinilai tidak realistis dan sangat jauh dari realisasi harga minyak di pasar internasional.

"Kita pada dasarnya menyetujui RAPBN yang diajukan pemerintah, tetapi DPR akan mengkaji kembali mengenai keputusan pemerintah mengajukan asumsi harga minyak hanya US\$ 24 per barel," kata wakil ketua Panitia Anggaran dari fraksi PDI-P Poltak Sitorus kepada *Pembaruan* di Jakarta, Senin (23/8).

Menurut dia, kesempatan revisi masih terbuka, apalagi penetapan asumsi harga minyak berkaitan dengan besarnya subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang harus ditanggung pemerintah mendatang, sehingga kalau tidak diperhitungkan secara matang bisa membebani anggaran.

Sementara itu, Sekjen Partai Bulan Bintang MS Ka'ban yang ditemui terpisah mengatakan, fraksinya juga akan meminta kepada pemerintah merevisi asumsi harga

minyak yang diusulkan dalam RAPBN 2005. Sebab, harga minyak di pasar internasional sudah mencapai US\$ 48 per barel. Sementara di RAPBN hanya US\$ 24 per barel.

Selisihnya, jelas Ka'ban, sangat besar, sehingga banyak perhitungan-perhitungan yang bisa bias. Dengan revisi, sejumlah pos-pos tertentu akan mengalami perhitungan ulang seperti penerimaan pajak dan tentu subsidi BBM.

"Kita memperkirakan angka yang realistis jika pemerintah menetapkan asumsi harga minyak sebesar US\$ 40 per barel, mengingat konflik Timur-Tengah khususnya krisis Irak akan berlangsung dalam jangka waktu panjang, sehingga biasanya masih akan terasa pada APBN 2005," kata Ka'ban.

Sedangkan, kemungkinan membengkaknya subsidi BBM, dia mengatakan siapapun pemerintah yang akan datang harus berani mengambil kebijakan yang tegas, untuk secara perlahan-lahan mengurangi subsidi minyak, karena dinilai sudah tidak sesuai dengan harga yang realistis.

Menurut Ka'ban, pemerintah mendatang sebaiknya mengurangi subsidi minyak dan mengalihkan pada subsidi yang langsung menyentuh masyarakat kecil seperti

mengumpulkan beberapa pelajar dan mahasiswa yang betul-betul tidak mampu kemudian disubsidi oleh pemerintah.

Pendapat senada juga diusung Fraksi Reformasi seperti yang dikemukakan oleh Wakil Ketua Sub Perbankan Komisi IX DPR, Rizal Djailil. Menurutnya, Fraksi Reformasi dalam pandangan umumnya akan menyoroti soal harga minyak. "Ini yang akan kita permasalahan nantinya, pemerintah mau memakai dana dari mana untuk mencukupi kebutuhan minyak dalam negeri.

Saya kira besar kemungkinan pemerintah akan menggunakan dana darurat (*emergency*) sebagai *contingency plan* mengantisipasi kelangkaan minyak di daerah," katanya.

Selain masalah harga minyak, Fraksi Reformasi juga mengingatkan pemerintah yang akan datang untuk memperhatikan masalah beban utang, karena dalam RAPBN yang disampaikan pemerintah ke DPR, sangat terlihat pembayaran utang masih memberatkan APBN.

Setuju Dibahas

Secara umum, RUU RAPBN 2005 yang diajukan pemerintah disetujui untuk dibahas lebih lanjut oleh DPR

dan pemerintah. Tiga fraksi yang telah menyampaikan pandangannya dalam Rapat Paripurna DPR, di Jakarta, Selasa (24/8), yakni Fraksi T-NI/Polri, Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Reformasi, menyatakan hal persetujuan itu.

Fraksi Reformasi menilai, APBN 2005 terlalu optimistik, tidak ekspansif dan asumsinya terlihat kontraktif. Fraksi itu mengharapkan RAPBN 2005 bisa menciptakan pertumbuhan sektor riil mengingat untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia dibutuhkan adanya pertumbuhan dari sektor riil.

Fraksi Reformasi juga menyayangkan sikap pemerintah yang meminta Dana Moneter Internasional (IMF) untuk melakukan penjadwalan utang yang dinilai permintaan itu sangat terlambat.

Pasalnya, pemerintah menyampaikan hal itu justru pada akhir masa jabatan. Padahal di RAPBN 2005 Indonesia akan terbebani dengan pembayaran utang.

Sementara dari Fraksi Kebangkitan Bangsa menilai pertumbuhan domestik bruto yang diasumsikan 5,4 persen belum cukup mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi itu juga sulit dicapai karena kepercayaan interna-

MONITORING

01 BINA INDONESIA	02 BINA INDONESIA
03 KOMPAS	04 KOMPAS
05 KRAN TEMPO	06 KRAN TEMPO
07 MEDIA INDONESIA	08 MEDIA INDONESIA
09 MERACA	10 MERACA
11 PIRAN RAKYAT	12 PIRAN RAKYAT
13 RAKYAT MERDEKA	14 RAKYAT MERDEKA
15 SEBUKLA	16 SEBUKLA
17 SUARA KALIA	18 SUARA KALIA

01 LISTRIK	02 LISTRIK
03 LISTRIK	04 LISTRIK
05 LISTRIK	06 LISTRIK
07 LISTRIK	08 LISTRIK
09 LISTRIK	10 LISTRIK
11 LISTRIK	12 LISTRIK
13 LISTRIK	14 LISTRIK
15 LISTRIK	16 LISTRIK
17 LISTRIK	18 LISTRIK

sional belum pulih terutama sektor riil dan pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan pada 2005 akan melambat.

Fraksi Kebangkitan Bangsa melalui juru bicaranya, Nur Hasan, mengusulkan pemerintah harus realistis, karena beberapa tahun ini produk domestik bruto asumsinya tidak pernah tercapai.

Asumsi pemerintah dalam RAPBN 2005 juga dinilai tidak menyentuh kepentingan rakyat. Fraksi Kebangkitan Bangsa juga mengusulkan agar pemerintah memperhatikan kenaikan gaji guru. Namun, hal yang digambarkan menurut fraksi ini adalah pada RAPBN 2005 adalah adanya program kebijakan untuk tidak menaikkan tarif dasar listrik dan memperhatikan sektor pendidikan dan kesehatan.

Sementara dari fraksi TNI/Polri melalui juru bicaranya, Sugimangun Sukarto menilai kesinambungan fiskal harus tetap ada dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat. Kesenambungan fiskal diperlukan untuk memberikan ruang untuk pemerintahan baru. Diharapkan juga agar RAPBN 2005 mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi.

(B-15/L-10)

17

(*social expenditure*) atau infrastruktur yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Apalagi, subsidi BBM selama ini terbukti tidak tepat sasaran.

Dengan beban pembayaran utang dalam dan luar negeri yang sekitar Rp 66 triliun dan subsidi BBM Rp 63 triliun, berarti untuk dua pos pengeluaran ini saja pemerintah harus menyisihkan hampir Rp 130 triliun. "Siapa pun presidennya nanti harus berani melakukan pengurangan subsidi dengan menaikkan harga BBM ke level yang lebih realistis. Dengan harga minyak mentah yang melambung dan subsidi BBM yang sedemikian membengkak, pemerintah sebenarnya memiliki argumen yang lebih kuat untuk memangkas subsidi. Sebab, membengkaknya subsidi itu sendiri tidak adil, baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat," ujarnya.

Anton tak yakin presiden hasil pemilihan umum presiden putaran kedua tanggal 20 September mendatang akan berani mengambil langkah itu. "Megawati Soekarnoputri, kalau menang, mungkin siap untuk menaikkan harga BBM. Namun, kalau itu dia lakukan, dari sisi kepentingan politik tidak bijaksana. Apalagi RAPBN 2005 juga mengasumsikan tidak ada kenaikan harga BBM di tahun 2005. Demikian pula kalau Susilo Bambang Yudhoyono yang menang," ujar Anton.

Oleh karena itu, ia melihat APBN masih akan sangat ter-

bebani oleh lonjakan beban subsidi BBM pada tahun depan, dan baru tahun berikutnya subsidi BBM bisa dikurangi secara bertahap.

Surat presiden

Menteri Keuangan menekankan, pemerintah tetap mengupayakan agar defisit APBN tidak mengalami perubahan signifikan. "Defisit yang sangat memengaruhi pembayaran utang dan pembiayaan anggaran hanya akan berubah sedikit di atas yang direncanakan 1,2 persen dari PDB, yaitu 1,3 persen dari PDB," ujarnya.

Sebelumnya, dalam Sidang Paripurna DPR, yang dipimpin Wakil Ketua DPR Bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan Tosari Widjaya, dibacakan surat Presiden Megawati tertanggal 24 Agustus 2004 tentang revisi UU Nomor 28 Tahun 2003 tentang APBN 2004. Presiden meminta prioritas DPR dalam pembahasan APBN-P 2004 itu.

Sidang Paripurna DPR akhirnya menyetujui pembahasan Rancangan APBN-P 2004 dibahas Panitia Anggaran DPR. Pembahasan APBN-P akan dimulai pekan ini setelah Panitia Anggaran DPR selesai membahas Laporan Pelaksanaan APBN 2004 semester I 2004.

Dari APBN-P 2004 yang diajukan, pemerintah merencanakan pendapatan negara dan hibah sekitar Rp 401 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 349,9 triliun. Sedangkan belanja negara direncanakan sebesar Rp 427 triliun, dari sebelumnya Rp 374,3 triliun.

Anggito menambahkan, untuk pembiayaan anggaran dalam APBN-P 2004, pemerintah tetap merencanakan sumber pembiayaan dari privatisasi badan usaha milik negara (BUMN) sebesar Rp 5 triliun.

Selain itu, penjualan aset sebesar Rp 12,9 triliun, penerbitan surat utang negara (SUN) tetap sebesar Rp 32,5 triliun, serta pinjaman luar negeri sebesar Rp 21,7 triliun—meliputi pinjaman proyek Rp 18,6 triliun dan pinjaman program sebesar Rp 3,1 triliun.

Sumber pembiayaan lainnya disebutkan juga berasal dari perbankan dalam negeri, yang terdiri dari penggunaan rekening dana investasi (RDI) dan *cash to bond swap* sebesar Rp 23,9 triliun.

Dukung pembatalan

Tosari menyatakan, DPR juga akan mendukung langkah pemerintah untuk membatalkan perjanjian pajak (*tax treaty*) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Mauritius asalkan tidak merugikan pemerintah, khususnya dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Pemerintah Indonesia sebelumnya secara sepihak telah membatalkan perjanjian mengenai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Pemerintah Mauritius yang ditandatangani beberapa tahun lalu.

Sebelumnya, akibat adanya perjanjian pajak tersebut, banyak perusahaan internasional dan perusahaan dalam negeri—melalui *special purpose vehicle* (SPV)—melakukan

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2004

Dalam APBNP Harga Minyak USD 36/Barel

Subsidi BBM Naik Menjadi Rp 63 Triliun

JAKARTA, (PR).-

Pemerintah mematok harga minyak sebesar 36 dolar AS per barel dalam APBN Perubahan (APBNP) 2004. Akibatnya, angka subsidi bahan bakar minyak (BBM) juga berubah menjadi Rp 63 triliun dari sebelumnya yang dianggarkan dalam APBN 2004 sebesar Rp 14,6 triliun. Menteri Keuangan Boediono mengungkapkan asumsi-asumsi perubahan dalam APBNP itu di gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/8). "Perubahan asumsi makro untuk APBN 2004 antara lain yang sangat menonjol adalah perubahan harga minyak rata-rata menjadi 36 dolar per barel," katanya.

Dengan besaran subsidi Rp 63 triliun, defisit anggaran lebih besar di atas target semula yakni menjadi 1,3 persen dari PDB dari target sebelumnya 1,2 persen. "Tetapi intinya, dengan asumsi harga minyak seperti itu kita upayakan agar *bottom lines* yakni defisit yang tentunya sangat memengaruhi utang kita terhadap pembiayaan, hanya sedikit di atas yang ditetapkan yakni 1,3 persen," ujar Boediono.

Untuk menutupi defisit, peme-

rintah sudah memiliki sumber dana seperti setoran BPPN, penjualan aset PPA, dan penerbitan surat utang negara (SUN) yang akan diupayakan bisa mencapai target yang ditetapkan. Pemerintah berencana menerbitkan SUN Rp 32,5 triliun tahun ini.

Menurut dia, asumsi dasar APBN 2004 yang lainnya juga berubah yaitu pertumbuhan 4,8 persen, inflasi dari 6,5 persen menjadi 7,0 persen, nilai tukar rupiah dari Rp 8.600,00 menjadi Rp 8.900,00 per dolar AS. Sertifikat Bank Indonesia (SBI, 3 bulan) dari 8,5 persen menjadi 7,6 persen, dan produksi minyak dari 1,15 juta barel per hari menjadi 1,072 juta barel per hari.

Ketua Badan Analisa Fiskal (BAF) Depkeu Anggito Abimanyu menambahkan, dipatoknya harga minyak pada angka 36 dolar per barel, karena pemerintah ingin menyesuaikan dengan angka yang lebih realistis. "Ada risiko tambahan, tapi kemampuan anggaran cukup untuk membiayai kenaikan harga minyak," katanya.

Menurut dia, pemerintah tidak ada rencana untuk menaikkan

harga BBM sampai pilpres mendatang. Namun kebijakan selanjutnya apakah akan ada menaikkan harga BBM atau tidak, diserahkan kepada pemerintah selanjutnya.

Harus hati-hati

Pengamat ekonomi dari Indef, Imam Sugema menyatakan bahwa pemerintah seharusnya lebih realistis dan hati-hati dalam menyusun RAPBN, serta jangan terlalu rendah mengeluarkan berbagai asumsi yang pada akhirnya justru akan membuang-buang waktu untuk merevisi. "Pemerintah sebaiknya jangan terlalu membuang-buang waktu dalam merumuskan RAPBN atau APBN sehingga tidak lagi melakukan revisi-revisi berbagai asumsi yang sebelumnya telah dibuat," kata Imam.

Menurut dia, dengan tingginya harga minyak mentah di pasar dunia yang menyentuh 47 dolar per barel, membuat perekonomian nasional sedikit terguncang yang pada akhirnya berbagai asumsi yang dibuat dalam RAPBN 2004 harus direvisi. "Memang perubahan besaran APBN 2004 harus dilakukan pemerintah mengingat asumsi-asumsi yang dulu dibuat terlalu optimistik dan terlalu rendah sehingga tidak bisa dijaga," katanya.

Permintaan gas

Sementara itu, tingkat permintaan gas dalam waktu dekat diperkirakan akan semakin tinggi seiring dengan kenaikan harga minyak dunia yang

mendekati 50 dolar AS per barel. Upaya pengalihan pemakaian energi gas ketimbang minyak bumi juga didorong oleh tingkat efisiensinya yang lebih tinggi. "Saat ini saja sudah banyak perusahaan besar dan kecil yang ingin segera beralih kepada gas, namun belum bisa dilaksanakan," ungkap Corporate Secretary PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk, Widyatmiko Bapang di Jakarta, Selasa (24/8).

Namun, diakui, pemenuhan gas kepada konsumen untuk saat ini belum mencukupi, bukan saja karena pasokannya, tapi juga akibat belum adanya jalur distribusi dan transmisi untuk menyalurkan gas yang dibutuhkan. Sebagai antisipasi peluang bisnis ini, kata dia, pihaknya secara agresif telah membeli gas bumi dalam jumlah besar dari berbagai ladang gas di Indonesia. Hingga saat ini, untuk 2004 telah ditandatangani beberapa kontrak pembelian gas dari beberapa pemasok gas.

Hal itu, lanjutnya, akan memberi dampak positif pada kenaikan pendapatan. "Khususnya hasil dari tambahan perolehan pasokan gas di tahun 2004 ini baru akan naik mulai 2005. Pendapatan akan lebih meningkat tajam mulai 2007 saat pasokan ConocoPhillips mulai mengalir," tambah Widyatmiko.

Dia tidak memungkiri bahwa akan terdapat dampak lainnya dari

serangkaian kontrak-kontrak pembelian gas bumi terhadap pergerakan harga saham PGN di bursa. Harga saham PGN telah mulai menguat dari harga Rp 1.150,00 per saham yang merupakan harga terendah selama ini menjadi Rp 1.225,00.

Widyatmiko mengakui, perdagangan saham PGN walau jumlah saham yang beredar cukup besar namun tidak termasuk saham yang mempunyai nilai transaksi tinggi. Menurutnya, penyebab tidak terlalu tingginya nilai transaksi saham PGN disebabkan karakteristik investor yang umumnya investor jangka panjang dan cenderung memilikinya untuk jangka panjang. "Apalagi investor tersebut sudah mengerti bahwa kinerja keuangan PGN ke depan akan meningkat tajam seiring dengan mulai disalurkan pasokan gas baru PGN," katanya.

Dia optimis bahwa kinerja harga saham PGN akan meningkat yang diindikasikan oleh peningkatan tajam kunjungan *fund manager* dan analis saham, baik asing dan lokal dalam tiga minggu terakhir. Indikasi lain, adanya rekomendasi beli oleh para analis saham.

Seperti diketahui, kontrak jual beli gas antara PGN dengan kontraktor bagi hasil asal Amerika Serikat, ConocoPhillips telah ditandatangani. Kontrak itu senilai Rp 39 triliun untuk gas sebanyak 2,3 triliun kaki kubik selama 17 tahun. Diperkirakan, BUMN tersebut akan mendapat tambahan pendapatan secara bertahap antara 200 juta sampai dengan 500 juta dolar. (A-78/A-109)***

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
HALAMAN: 1 TAHUN 2004

Govt proposes huge fuel subsidy hike

Dadan Wijaksana
The Jakarta Post/Jakarta

The fuel subsidy may jump by 334 percent of its initial figure due to soaring oil prices, the government said on Tuesday as it proposed a revision to the 2004 state budget.

A fuel subsidy is necessary because the country also imports fuel to meet national demand.

Minister of Finance Boediono said the government might have to spend a whopping Rp 63 trillion (US\$7.08 billion) for the fuel subsidy — compared to Rp 14.5 trillion as budgeted initially — as the oil price assumption had been revised upward to \$36 per barrel from \$22 per barrel to better reflect current developments in international oil prices.

Oil prices have been soaring upon concerns over disruptions to supply and strong demand from energy-hungry

	Initial	Revision
1. Economic growth (%)	4.8	4.8
2. Inflation (%)	6.5	7
3. Exchange rate (Rp/US\$)	8,600	8,900
4. Three-month SBI	8.5	7.5
5. Oil price (US\$/barrel)	22	36
6. Oil output (mbd)	1.15	1.072

Source: Ministry of Finance JP/Irma

countries like China and India, reaching to near \$50 per barrel last week.

The government has said it would not raise fuel prices at home despite soaring world prices to ensure political stability during election year. Fuel prices were last raised in January 2003.

However, high oil prices have renewed concerns about the costly fuel subsidy, as the revised figure almost equals the Rp 69.6 trillion development spending for this year,

and because the subsidy has been enjoyed largely by car owners of the upper income bracket — not to mention the rampant smuggling of subsidized fuel products to neighboring countries.

Some experts have said the fuel subsidy policy should be abandoned immediately, as it would lead eventually to a fiscal disaster and affect the overall economy.

"This is a consequence of the government applying a method of subsidy that

basically allows the haves to enjoy it. It's said that even those who drive a Mercedes Benz can benefit from it," House Budget Commission chairman Abdullah Zainie said.

"(The House) has been formulating a straight subsidy scheme that will serve only those people in need of it. It's not going to be easy, as it has to be backed up by solid research and data on the poor, while a sound control mechanism has to be set up to minimize abuse. It's difficult, but feasible."

The House will decide within a month whether to accept the government revision of the 2004 state budget.

Meanwhile, Boediono said the expanded fuel subsidy would not have a serious impact on the state budget, as deficit was projected to increase only slightly, from 1.2 percent to 1.3 percent of the gross domestic product.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 INVESTOR IND.

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 1

TAHUN 2004

Subsidi BBM Membengkak Jadi Rp 63 Triliun

JAKARTA — Pemerintah mengubah asumsi dasar harga minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2004 menjadi US\$ 36 per barel dari asumsi sebelumnya sebesar US\$ 22 per barel. Produksi minyak juga berubah dari 1,150 juta barel menjadi 1,072 juta barel per hari. Akibatnya, subsidi bahan bakar minyak membengkak menjadi Rp 63 triliun. Sebelumnya, subsidi hanya Rp 14,5 triliun.

Menteri Keuangan Boediono mengatakan, perubahan asumsi harga minyak itu paling me-

nonjol dibandingkan asumsi dasar lainnya.

"Dengan asumsi harga minyak seperti itu, kami upayakan agar defisit hanya naik sedikit dari yang direncanakan sebelumnya," kata Boediono di Jakarta kemarin.

Pemerintah terpaksa mengubah asumsi dasar harga minyak karena harga minyak mentah dunia terus melambung akhir-akhir ini. Harganya bahkan sempat hampir menyentuh sedikit di bawah US\$ 50 per barel—tertinggi sepanjang sejarah.

Membengkaknya subsidi BBM membuat defisit anggaran ikut naik dari 1,2 persen (Rp 24,4 triliun) menjadi 1,3 persen dari produk domestik bruto (Rp 26,3 triliun).

Menurut Boediono, pemerintah masih mampu menutup defisit itu. Pemerintah sudah menyiapkan sumber-sumber pembiayaan, seperti penjualan aset-aset yang dikelola PT Perusahaan Pengelola Aset yang totalnya Rp 12,9 triliun, adanya kelebihan setoran Badan Penyehatan Perbankan Nasional Rp 5,4 triliun, serta penerbitan surat utang

negara bernilai Rp 32,5 triliun.

Meskipun demikian, Boediono mengakui membengkaknya defisit akan sangat mempengaruhi keuangan pemerintah terhadap pembiayaan.

Selain asumsi harga minyak, pemerintah juga mengubah asumsi dasar inflasi dari 6,5 persen menjadi 7 persen. Begitu juga dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, diubah menjadi Rp 8.900 per dolar AS dari Rp 8.600 per dolar AS. Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 3 bulan turun jadi 7,6 persen dari sebelumnya 8,5

persen.

Namun, pemerintah tidak mengubah asumsi lain, misalnya target pertumbuhan ekonomi, karena pemerintah tetap optimistis itu bisa tercapai. Pertumbuhan ekonomi juga tetap ditargetkan sebesar 4,8 persen. Soalnya, pertumbuhan ekonomi semester pertama sudah mencapai 4,5 persen.

Deputi Gubernur BI Aslim Tajuddin menilai perubahan patokan nilai tukar rupiah itu sangat realistis. Faktor eksternal seperti kenaikan suku bunga oleh bank sentral AS, Federal Reserve

Bank, sudah diperhitungkan pasar. "Rupiah akan berada di kisaran itu (Rp 8.900); kami akan mengarahkan ke situ," katanya.

Perubahan asumsi inflasi sebesar 7 persen, juga sangat realistis, meski perhitungan *year on year* pada Juni sudah menjadi 7,2 persen.

Tapi jika dilihat pergerakan bulanan, kecenderungannya selalu menurun sejak Mei lalu. Momentum inflasi pada hari raya hanya musiman saja. Jadi, kami optimistis (target) 7 persen itu akan tercapai," kata Aslim.

● ss kurniawan/bagja hidayat-tnr

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

TAHUN 2004

12 Kontraktor ikut tender 10 blok migas baru

JAKARTA (Bisnis): Sejumlah 12 kontraktor bagi hasil migas (kontraktor *production sharing/KPS*) akan mengikuti tender 10 blok migas baru yang ditawarkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak & Gas Bumi pada September 2004.

Sumber *Bisnis* menyebutkan ke-12 KPS itu sudah memasukkan penawaran pembelian di Ditjen Migas, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Ada 12 penawar yang serius untuk ikut *bid* 10 blok migas baru itu, seperti Petronas Carigali, Hasky Energy, Caltex Pasific, Total E&P Indonesia, dan Exxonmobil," katanya kemarin.

Sisanya, dia menambahkan a.l. CNOOC, Talisman, Genting Oil, Anadarko Petroleum Corp, Inpac, PetroChina, dan PT Waropen Petroleum.

Sementara itu, Novian M. Thaib, Direktur Eksplorasi dan Produksi pada Ditjen Migas, membenarkan hal itu dalam konfirmasinya kepada *Bisnis* melalui pesan layanan singkat kemarin.

Namun, direktur yang kini ditunjuk sebagai pejabat sementara untuk menggantikan Dirjen Migas Iin Arifin Takhyan itu tidak merinci penawaran yang diajukan masing-masing KPS itu untuk berpartisipasi dalam pembelian 10 blok baru.

Penawaran blok itu sendiri dibuka pemerintah untuk memungkinkan pengelolaan 10 ladang migas baru di sekitar Pulau Jawa, Madura, Sumatra, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.

Secara rinci, BP Migas menyebutkan

Split bagi hasil migas tender blok baru

Blok	Bagian pemerintah (%)		Kontraktor (%)	
	Minyak	Gas	Minyak	Gas
Lhokseumawe	75	60	25	40
Ujungkulon	75	60	25	40
N.E. Madura III	80	65	20	35
N.E. Madura IV	75	60	25	40
N.E. Madura V	80	65	20	35
Rote I	65	60	35	40
Rote II	65	60	35	40
Babar	65	60	35	40
Selaru	65	60	35	40
Manokwari	65	60	35	40

Sumber: Ditjen Migas

blok tersebut a.l. Blok Lhokseumawe (Nangroe Aceh Darussalam), Ujung Kulon (Banten), North East Madura III, IV dan V (Jawa Timur), Rote I dan II (NTT), Babar dan Selaru di Maluku Tenggara dan Blok Manokwari (Papua).

Melalui ketentuan tender, peserta dapat meminta penjelasan penawaran yang dibuka sejak 6 Juli lalu hingga 20 September mendatang. Sementara batas akhir pengajuan penawaran ditetapkan pada 30 September 2004.

Selain membuka tender, pemerintah juga menetapkan pola bagi hasil dan insentif itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing blok. Hal itu berbeda dengan sebelumnya yang ditentukan dengan porsi perbandingan 85%:15% untuk minyak dan 70%:30% untuk gas bumi.

Pemberian insentif itu dilakukan untuk memicu minat investor menanamkan modal di Indonesia menyusul adanya beberapa blok migas lain yang akan ditawarkan pada tahun mendatang. (06)

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 INVESTOR IND.

KODE: LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 14

TAHUN 2004

Oil prices slip below \$46 as Iraq flow rises

Reuters
London

Oil prices dipped below US\$46 on Tuesday, making a third day of falls as a more optimistic Iraq export picture unwound some of the supply worries that have lifted the market to historic levels.

U.S. light crude fell 17 cents to \$45.88 a barrel, \$3.52 below last week's \$49.40 peak, the highest level in 21 years of New York oil futures trading. London Brent crude lost 26 cents to \$42.77 a barrel.

The correction follows a failure to hit the psychological \$50 mark in New York, together with the resumption of full tilt Iraqi exports from the south and restored flows in the north.

"Oil continues on the defensive after (NYMEX) failed to test \$50 and exports from Iraq appear to be on the rise at least for the moment," wrote brokerage Refco.

Iraq resumed pumping crude oil along its northern Kirkuk pipeline to the Turkish Mediterranean port of Ceyhan late on Friday, at a rate heard on Monday to be around 450,000 barrels per day (bpd) — just over half normal capacity.

Iraq last sold oil pumped through from Kirkuk in late May.

Authorities have also

restored full exports from the south, which continued on Tuesday despite renewed clashes in Basra city.

Tankers were loading Basra Light crude from the Basra terminal, formerly known as Mina al-Bakr, and Khor al-Amaya terminal at two million barrels per day, a level reached only occasionally, shippers said.

Reduced flows from Iraq and concern that the financial turmoil at Russia's top producer YUKOS could ultimately disrupt supplies have helped drive oil prices up \$10 since the end of June. Rapid demand growth has left world oil supplies with little leeway to make up for disruption.

The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) is pumping about 30 million bpd, with only Saudi Arabia, the world's biggest exporter, with any significant spare capacity.

Yukos on Monday cut its oil output forecast for this year by 4.5 percent and said it would slash capital expenditure by more than a third due to its tax dispute with the state.

Although demand growth has been robust, at the fastest rate in 24 years despite the strength of the market, some signs have emerged of the threat to economic growth.

Japanese Finance Minister Sadakazu Tanigaki warned

on Tuesday that it was becoming increasingly necessary to watch the impact of high oil prices on the world's second biggest economy.

Japan, which imports virtually all of its oil and gas requirements, is the third biggest consumer behind the United States and China.

U.S. Federal Reserve Governor Ben Bernanke issued a similar warning, but stopped short of saying the U.S. recovery was in danger.

"There's going to be a little bit of a slowdown effect ... but at current level, anyway, I think it won't derail what looks like a self-sustaining expansion at this point," Bernanke said in a television interview late on Monday.

Some market players were starting to look at the possibility that prices may have peaked, after this year's more than 40 percent gains.

"Unless the market's worst fears of a physical supply disruption are realized, crude prices may finally be close to a turning point," wrote independent oil analyst Geoff Pyne.

Citing a more stable outlook for Venezuela, optimism for Yukos oil exports and more predictable Iraqi flows, he added: "With this background there are few excuses for maintaining the recent risk premium, which we estimate at upwards of \$10 per barrel."

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 14

TAHUN 2004

China considers US\$6b coal project with South Africa

Agence France-Presse
Shanghai

China is mulling a US\$6 billion coal project with South African company Sasol that could give the energy-hungry mainland an additional six million tonnes of oil annually, state press reported Tuesday.

In September a Sino-South Africa team will begin studying the feasibility of building two coal liquefaction production bases in northern Shaanxi province and Ningxia autonomous region, Xinhua news agency said.

"This marks China's strengthened efforts in finding substitute energy and its

attempts to counteract price fluctuations in the global crude oil market," Zheng Xinli, deputy director of the policy research office of the communist party's central committee, was quoted as saying.

Coal liquefaction is the conversion of coal into synthetic fuels. Liquid and solid products from coal can be used for fueling vehicles, power generators as well as yielding materials for chemicals.

China's increasing dependency on Middle East oil and rising crude prices have spurred a new sense of urgency in the country to guarantee its energy supplies as the economy continues to

expand at record pace.

A net importer of petroleum products since 1993 and of crude oil since 1996, China is reliant on overseas producers for one third of its demand.

To reduce its reliance on foreign crude oil, China started coal liquefaction efforts in 2001 and has managed to keep down what are generally considered expensive production costs to US\$20 per barrel, Zheng said.

China is interested in coal liquefaction on a large scale as the country's coal reserves of some one trillion tons account for 70 percent of its total energy reserves, Xinhua said.

25

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGST		SEPT		OKT		NOV		DES								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : 5

TAHUN 2004

Students protest kerosene shortage

JAYAPURA, Papua: About 50 students in Jayapura protested on Tuesday outside state oil and gas company PT Pertamina, demanding the firm put an end to a kerosene shortage that has plagued the province for the past month.

The students also called for the company to explain to the public the reasons for the shortage.

John Awi, the coordinator of the protest, said the shortage had led the price of kerosene to soar to almost 10 times the normal price, with the fuel selling at up to Rp 10,000 a liter in some places. — JP

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGST		SEPT		OKT		NOV		DES								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN: 16																								TAHUN 2004						

Iraq oil revenues hit \$9b this year

DUBAI: Iraqi Oil Minister Thamir Ghadhban said on Monday that revenues from crude oil exports so far this year reached more than US\$9 billion and could have been higher if not for sabotage attacks.

"In the second half of last year, we exported oil from the north and the south and realized revenues of over \$5 billion. So far this year, we have realized more than \$9 billion in revenues — that is, more than \$14 billion (including the second half of last year) from selling crude oil by exporting it through ports," he told *Al Arabiya* television.

"And this could have been much higher if it had not been for the targeting of export pipelines and other losses from product and gas lines which prevented refineries from operating at full capacity," he added. — *Reuters*

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 14

TAHUN 2004

Thailand to begin energy saving plan to cut oil demand

Agence France-Press
Bangkok

Thailand's cabinet on Tuesday approved a package of compulsory energy-saving measures including shortening service hours at department stores and petrol stations aimed at dampening the shock of surging oil prices.

Energy Minister Prommin Lertsuridej said the cabinet endorsed the measures, which were a compromise solution after retailers complained of tight restrictions, as a way to maintain economic growth and employment while cutting back on fuel consumption.

"We estimated that we can save approximately 3.0 billion baht (US\$72 million) annually but most of all we really want the public to be aware of energy saving," Prommin told reporters.

Most of the 13,328 petrol

stations nationwide were ordered by cabinet to immediately cease all operations between midnight and 5:00 am (2200 GMT), slashing the hours of several stations which had operated round the clock.

Gas stations on Thailand's four main arteries, where many trucks and buses operate 24 hours a day, were allowed to determine their own hours.

Starting on Sept. 6, department stores, shopping centers and hypermarkets are required to curb their opening hours by at least 90 minutes from Monday to Thursday and by one hour on Friday, with no change on weekends and holidays.

Operators who fail to comply with the ruling could face jail time and a fine of up to 50,000 baht.

Prommin said the government had received proposals from convenience stores,

which number about 6,000 nationwide, to implement their own energy saving measures.

Retailers have argued that the restrictions are unfair and could lead to losses of jobs and revenue of over 30 billion baht in the next six months.

Only 8 percent of Thailand's power is generated from oil-fired stations but costs have risen sharply with oil prices in Asia reaching more than \$47 a barrel.

An influential Thai research centre forecast that Thailand would have to spend more than 500 billion baht for importing oil for 2004, an increase of some 40 percent from the previous year.

Thailand adopted similar energy-saving measures in June this year and during the oil shocks of 1975 and 1980.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN: 16

TAHUN 2004

**RP launches campaign
to trim oil use**

MANILA: The Philippines on Tuesday launched a campaign to trim its oil consumption by 12 percent to deal with high crude prices.

The campaign aims to achieve "energy savings of 23 million barrels of oil equivalent, equal to a 12 percent reduction in our oil importation (bill) and savings of US\$784 million" yearly, Energy Secretary Vincent Perez told reporters.

The Philippines imports all of its oil requirements, and soaring crude prices have put pressure on consumer prices.

"We believe (high) oil prices are here to stay for quite sometime," he said.

"Thailand has already launched a campaign earlier this week and we are following suit." — AFP

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
- MAKLUMAT RAKYAT

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 **23** 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2004

Pertamina akan Ungguli Petronas

Jakarta, *Maklumat*. Direktur Utama (Dirut) baru PT Pertamina Widya Purnama, berjanji akan menjadikan Pertamina sebagai perusahaan minyak dan gas terdepan di kawasan Asia Tenggara, mengalahkan perusahaan migas nasional Malaysia, Petronas. Dia juga menegaskan, selama menjabat dirut, akan melawan mafia minyak dan menjaga agar Pertamina tak "diobok-obok" lagi oleh oknum tertentu. Selain itu, juga mengatakan akan mundur jika dalam 100 hari tak mampu mewujudkan perbaikan di Pertamina.

Widya Purnama mengungkapkan itu dalam jumpa pers pertama sebagai Dirut Pertamina bersama direksi lainnya, Rabu (11/8). Direksi baru yang dilantik antara lain Wakil Dirut Mustiko Saleh, Direktur Hulu Hari Kustoro, Direktur Pengolahan Suroso Atmomartoyo, Direktur Pemasaran dan Niaga Arie Soemarno, serta Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) Suprijanto. Sementara Direktur Keuangan tetap dijabat Alfred Rohimone.

Widya juga menegaskan bahwa dirinya akan membuat perubahan budaya perusahaan sehingga bangsa Indonesia bangga dengan Pertamina. Dia mengatakan tak akan main-main dengan janji, dan akan mengajak serikat pekerja bersama-sama 23.000 karyawan membangun Pertamina.

Menurut dia, prioritas utama yang akan dilakukan di-reksi Pertamina adalah melancarkan distribusi pasokan BBM di dalam negeri. Pertamina harus menjamin masyarakat bisa mendapatkan BBM dengan murah sehingga kalau ada oknum Pertamina yang terlibat dalam penyelewengan distribusi BBM, harus segera dipecat.

"Memang sulit mengamankan pendistribusian BBM kalau masih ada penyelewengan. Jadi, kalau ada yang menyelewengkan BBM sebaiknya ditembak saja, kalau memang sulit untuk ditangkap," ujar Widya.

Direktur Pengolahan Suroso Atmomartoyo mengatakan, Pertamina akan meningkatkan produksi kilang BBM di Tanah Air. Setidaknya, masih ada potensi sekitar 20 hingga 30% untuk meningkatkan produksi BBM dalam negeri karena masih ada produk dari kilang di dalam negeri yang bisa ditingkatkan menjadi BBM.

Widya juga mengatakan akan menemui Presiden guna menyampaikan keinginan Pertamina untuk meningkatkan produksi gas alam untuk kebutuhan dalam negeri. Terutama penggunaan bahan bakar gas untuk kendaraan.

Menurut Widya, jika penggunaan gas ditingkatkan untuk bahan bakar kendaraan, berarti akan mengurangi penggunaan BBM. Dengan demikian, pemerintah bisa mengurangi subsidi BBM yang nilainya puluhan triliun rupiah setiap tahun. m

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : T. 3

TAHUN 2004

'Babak baru' perseteruan Pertamina-KBC

Polisi kini mengusut dugaan korupsi pada proyek PLTP Karaha Bodas. Jika terbukti terjadi penyuapan atau penggelembungan nilai terhadap proyek itu, dapatkah dijadikan dasar untuk membatalkan putusan arbitrase internasional di Jenewa, Swiss?

Pemerintah dan PT Pertamina sudah sepakat tidak akan membayar klaim sebesar US\$290 juta kepada KBC (Karaha Bodas Company) hingga dugaan indikasi korupsi yang merugikan negara pada proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Gunung Telaga Bodas, Garut, Jawa Barat terungkap ke permukaan.

Sikap itu merupakan strategi bagi perusahaan perminyakan nasional tersebut untuk mencoba lepas dari kewajiban menjalankan putusan arbitrase, yang menghukum perseroan itu untuk membayar ganti rugi sebagaimana dituntut KBC.

Pertamina melihat ada celah untuk menghindarkan diri dari keputusan arbitrase itu dengan membawa kasus proyek PLTP tersebut ke wilayah pidana.

Jika ditemukan unsur pidana dalam proyek PLTP itu, bisa dijadikan pegangan dan sebagai bukti baru bagi PT Pertamina untuk sidang banding arbitrase.

Benarkah demikian? Menurut Frans Hendra Winarta, konsultan hukum bisnis dan anggota Komisi Hukum Nasional, sebenarnya tidak ada kaitannya antara tindak pidana dalam proyek PLTP itu dengan putusan arbitrase di Swiss.

"Saya setuju kepolisian mengusut dugaan tindak pidana dalam kasus KBC. Namun hal itu tidak akan dapat membatalkan putusan arbitrase internasional. Pidana ya... pidana, arbitrase ya... arbitrase, karena merupakan dua hal yang berbeda," ujarnya.

Bagi Frans, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Namun, dia mengakui terdapat syarat-syarat tertentu yang dapat membatalkan putusan arbitrase.

Di Indonesia, pembatalan putusan arbitrase hanya dapat dilakukan bila memenuhi beberapa persyaratan.

Pertama, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu. *Kedua*, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan.

Ketiga, putusan yang diambil oleh majelis arbiter dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan perkara.

"Jadi, saya kira syarat-syarat pembatalan putusan arbitrase itu berlaku universal. Saya tidak melihat unsur pidana dapat membatalkan putusan arbitrase," tambahnya.

Adakah syarat-syarat itu yang menjadi alasan Indonesia mengusut dugaan korupsi proyek KBC?

Tidak jujur

Pemerintah kini memang tengah berusaha mengungkap adanya dugaan penyuapan atau penggelembungan nilai proyek PLTP yang merugikan negara dalam jumlah besar.

Dugaan tersebut dapat ditelusuri dari hasil penilaian tim independen yang berasal dari perusahaan Italia, yang menyebutkan nilai proyek itu hanya US\$50 juta.

Selain itu, berdasarkan hasil audit BPKP, KBC dinilai tidak jujur dalam melaporkan nilai investasi proyek dalam sidang arbitrase di Jenewa.

Nilai proyek yang disampaikan KBC dalam sidang tersebut lebih besar dibandingkan dengan hasil laporan realisasi *work planning and budgeting* kepada PT Pertamina.

Pertamina juga mengungkapkan bahwa KBC telah menerima manfaat asuransi US\$75 juta, padahal sebelumnya KBC mengingkarinya dalam sidang di arbitrase.

Fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat diangkat kembali untuk membatalkan putusan arbitrase. Hanya fakta hukum itulah—kalau memang benar ada—yang dapat membatalkan putusan arbitrase, tetapi tidak dengan cara membawanya ke jalur pidana.

Karena itu, seyogyanya dihindarkan kesan bahwa upaya pemerintah untuk mengungkap kasus pidana semacam bentuk *pressure* kepada KBC supaya perusahaan tersebut tidak melaksanakan putusan arbitrase, atau minimal sebagai posisi tawar menawar bagi pemerintah untuk mendapat pengurangan jumlah klaim KBC yang terus meningkat.

Dalam pandangan Humphrey R. Djemat—salah seorang arbiter pada

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)—cara pemerintah menunda pembayaran klaim KBC itu, dengan cara mengaitkannya terhadap kasus pidana, bukan langkah tepat.

"Pidana ya.. pidana, sementara putusan arbitrase tetap dijalankan. Putusan arbitrase itu bersifat *final and binding*," katanya kepada *Bisnis* belum lama ini.

Dia juga mempertanyakan, mengapa kasus dugaan pidana pada kasus KBC itu baru diungkap sekarang, dan tidak pada waktu proses sidang arbitrase kala itu.

"Ini nantinya akan jadi tanda tanya di masyarakat internasional. Jangan sampai ada kesan [pemerintah Indonesia] sekadar mencari-cari alasan," tambah Humphrey, yang juga Ketua PDC Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Cabang Jakarta.

Seandainya sejak awal kasus pidana pada proyek PLTP tersebut diusut, barangkali akan sangat berharga dan dapat menjadi pertimbangan bagi majelis arbiter untuk membuat keputusan dalam sengketa antara Pertamina dan KBC.

"Kalau sekarang mau dikaitkan kasus pidana di KBC dengan putusan arbitrase [tentu] tidak bisa. Putusan arbitrase itu sudah lama diterbitkan. Kalaupun ditemukan unsur pidana dalam kasus itu, maka individu yang terlibatlah yang dikenai hukuman, tidak akan mempengaruhi putusan arbitrase," kata Humphrey.

Jika dipandang dari segi hukum semata, kebijakan pemerintah dan PT Pertamina jelas merupakan pengingkaran terhadap sebuah keputusan arbitrase internasional.

Penolakan pembayaran klaim KBC itu sekaligus merupakan penolakan terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sehingga hal itu akan dinilai oleh komunitas internasional bahwa PT Pertamina, khususnya dan Indonesia umumnya tidak menghormati dan mematuhi hukum.

Dalam tatanan pergaulan internasional, kebijakan tersebut bahkan diperkirakan akan mempengaruhi citra Indonesia. Negeri ini bisa dinilai tidak memiliki itikad baik untuk menghormati putusan lembaga arbitrase.

Tak sekadar aspek hukum

Namun, perkara perseteruan menyangkut proyek KBC itu hendaknya tidak saja dipandang dari segi hukum semata, tapi juga bisa dilihat dari sisi kepatutan dan kepatutan.

Memang patut dipertanyakan, masih pantaskah KBC menuntut pembayaran ganti rugi US\$290 juta, sementara mereka sendiri sudah menerima klaim asuransi US\$75 juta.

Lagi pula berdasarkan hasil penilaian tim independen, proyek PLTP itu hanya sekitar US\$50 juta, sehingga tidak sebanding rasanya klaim pembayaran yang dituntut oleh KBC sebesar US\$261 juta.

Yang perlu dipertanyakan juga adalah sejauh mana tanggungjawab IMF

dalam kasus itu karena atas saran lembaga itulah, maka pemerintah membatalkan proyek PLTP Karaha Bodas.

IMF pada waktu itu adalah penasihat program ekonomi pemerintah Indonesia, sehingga secara moral sepatutnya turut bertanggungjawab atas kegagalan sejumlah proyek di Indonesia, termasuk proyek PLTP.

Yang menjadi pertanyaan, apakah konsekuensinya jika PT Pertamina dan pemerintah tetap tidak mau membayar klaim KBC?

"Paling-paling Indonesia—karena pemegang saham PT Pertamina adalah pemerintah—akan dicap negara yang tidak mematuhi hukum. Putusan arbitrase itu kan juga hukum," kata Frans.

Dia juga mengkhawatirkan proses

itu akan semakin memperburuk citra penegakan hukum di Indonesia di mata investor asing.

Satu hal yang pasti, penolakan pembayaran atau penundaan pembayaran klaim KBC tersebut akan makin memperbesar jumlah kewajiban PT Pertamina, karena sesuai putusan arbitrase, setiap keterlambatan akan dikenakan bunga.

Ketika majelis arbiter memutuskan perkara itu, nilai tuntutan KBC kepada PT Pertamina hanya sebesar US\$261 juta, tapi kini jumlahnya terus membengkak hingga US\$299 juta karena PT Pertamina menunda, atau tidak mau membayar klaim itu.

KBC kini gencar melaksanakan putusan arbitrase itu dengan mengajukan sita eksekusi terhadap aset PT Pertamina di luar negeri.

Terakhir, KBC diketahui mengajukan petisi ke pengadilan di Hong Kong untuk menyita aset Petral (Pertamina Trading Energy Ltd)—anak perusahaan PT Pertamina di luar negeri—sebagai kompensasi atas tagihannya kepada PT Pertamina. Selain itu, KBC konon juga sudah mengincar aset Petral di Singapura.

Tentu saja Pertamina tak tinggal diam. Perusahaan itu terus berjuang membatalkan putusan arbitrase itu dalam upaya menghadang upaya perusahaan dari AS tersebut menyita aset PT Pertamina baik di dalam maupun di luar negeri.

Malahan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum lama ini mengabulkan tuntutan PT Pertamina dan membatalkan putusan arbitrase.

Dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu, putusan arbitrase internasional Jenewa, Swiss menjadi tidak berlaku dan mempunyai kekuatan hukum lagi di Indonesia.

Namun Pertamina tampaknya belum merasa aman benar, dan belum bisa berbesar hati dengan putusan pengadilan di Indonesia. Sebab, KBC mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Proyek terhenti

Sengketa perdata antara Pertamina dan KBC bermula ketika dua badan

hukum usaha tersebut menjalin kerja sama melalui penandatanganan kontrak operasi bersama.

Dalam perjalanannya, proyek tersebut terhenti di tengah jalan karena ada Keppres yang menginstruksikan penghentian sejumlah proyek besar karena Indonesia sedang dilanda krisis.

KBC menilai penghentian proyek tersebut merugikan pihaknya, karena perusahaan itu sudah mengeluarkan dana hampir US\$100 juta untuk mengidentifikasi lebih dari 400 megawatt sumber panas bumi dan membangun infrastruktur.

Dengan penghentian proyek itu, KBC menilai sudah terjadi pelanggaran perjanjian oleh Pertamina.

KBC berusaha untuk bernegosiasi dengan Pertamina, namun tidak ditemukan kesepakatan, akhirnya sengketa tersebut dibawa ke arbitrase internasional di Jenewa, Swiss.

Arbitrase dipilih oleh KBC berdasarkan perjanjian antara mereka, di mana jika terjadi persengketaan, untuk menyelesaikannya dipilih arbitrase internasional.

Dalam sidang di arbitrase internasional tersebut, kedua belah pihak sama-sama memiliki argumen dan dasar hukum yang kuat untuk mempertahankan posisi mereka masing-masing.

Tapi, majelis arbiter lebih menerima dalil-dalil hukum yang dikemukakan KBC, sehingga putusannya menyatakan Pertamina diharuskan membayar ganti rugi kepada KBC sebesar US\$261 juta atas kerugian yang ditimbulkan akibat penundaan proyek tersebut.

Satu hal yang pasti, perseteruan antara PT Pertamina dan KBC bakal berlangsung lama. Banyak waktu tersita hanya tercurah untuk penyelesaian perkara itu, namun hasilnya belum juga memuaskan kedua belah pihak.

Masalahnya, bagi PT Pertamina bukan sekadar menjalankan putusan arbitrase tersebut, tetapi besarnya tuntutan yang diajukan KBC telah dinilai sebagai "tidak pantas."

Untuk mencari dan menemukan angka dan nilai tuntutan yang *fair*, alangkah baiknya kedua belah pihak duduk bersama kembali dan menyelesaikan perkara itu dengan pola pikiran secara bisnis dan menentukan angka klaim yang wajar.

Masih ada ruang untuk menyelesaikan perseteruan itu dengan tidak semata-mata melalui kerangka hukum, karena penyelesaian hukum hanyalah sekadar mencari siapa salah dan siapa benar.

• Suwantin Oemar



KRONOLOGI sengketa Pertamina vs KBC

1994: Karaha Bodas Company (KBC) didirikan untuk membangun dan mengoperasikan dua proyek pembangkit listrik panas bumi di Jawa.

November 1994: KBC menandatangani kontrak operasi bersama dengan Pertamina dan kontrak penjualan energi dengan PLN

Januari 1998: Presiden (waktu itu Soeharto) mengeluarkan Keppres yang menginstruksikan penghentian sejumlah besar proyek panas bumi, termasuk proyek KBC. Keppres itu merupakan pemicu timbulnya persengketaan antara KBC dan Pertamina.

September 1999: Dengar pendapat pendahuluan di tingkat arbitrase internasional Jenewa, Swiss. Putusan pengadilan arbitrase memihak KBC.

Juni 2000: Pengadilan arbitrase internasional diselenggarakan di Paris. Kedua belah pihak mengajukan argumentasi masing-masing.

Desember 2000: Pengadilan arbitrase internasional memutuskan Pertamina diperintahkan membayar uang gantirugi sebanyak US\$261 juta kepada KBC atas

pelanggaran perjanjian itu.

Desember 2001: Putusan akhir pengadilan arbitrase internasional disahkan oleh pengadilan distrik Texas, AS. KBC mengajukan gugatan melalui pengadilan di AS, Kanada, Hong Kong dan Singapura untuk mendapatkan pembayaran dari Pertamina. Putusan pengadilan luar negeri itu memenangkan gugatan KBC, namun Pertamina mengajukan banding.

Januari 2002: Pertamina mengajukan banding atas putusan pengadilan distrik Texas, AS.

Februari 2002: KBC menyerahkan surat perintah penahanan aset kepada beberapa bank di New York. Bank of America dan Bank of New York membekukan rekening Pertamina di dua bank itu.

Maret 2002: Pertamina mengajukan gugatan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meminta pembatalan atau menganulir putusan pengadilan arbitrase internasional.

April 2002: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KBC untuk tidak melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan di AS.

April 2002: Pengadilan Federal untuk distrik Texas Selatan, AS memerintahkan Pertamina untuk tidak mengambil langkah hukum



berkaitan dengan kasus itu (putusan arbitrase internasional) di Indonesia.

Mel 2002: Pengadilan di Hong Kong dan Singapura mensahkan putusan akhir pengadilan arbitrase Jenewa, Swiss dan memerintahkan pembekuan aset Pertamina.

Juni 2002: Pengadilan banding AS untuk second circuit mempertegas putusan pembekuan aset Pertamina.

Juli 2002: Pengadilan Delaware, AS memutuskan Pertamina harus membayar jaminan US\$261 juta untuk memenuhi putusan arbitrase internasional.

Agustus 2002: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan arbitrase internasional di Jenewa, Swiss.

Agustus 2002: KBC mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Juli 2004: KBC berupaya untuk melakukan penyitaan terhadap aset Petral di Hong Kong dan Singapura.

Agustus 2004: Pemerintah dan PT Pertamina menyatakan tidak akan membayar klaim KBC hingga dugaan korupsi pada proyek PLTP itu diungkap ke permukaan. (su)



HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 INVESTOR IND.

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 **24** 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2004

Pemerintah Berpeluang Gugat Balik KBC

JAKARTA - Pemerintah diminta serius mengusut dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proyek Karaha Bodas Company (KBC). Hal itu dimaksudkan agar pemerintah tidak perlu membayar klaim sebesar US\$ 299 juta yang diajukan oleh perusahaan itu. Bahkan, sebaliknya pemerintah bisa menuntut balik KBC, lengkap dengan dendanya.

Demikian dikatakan pengamat migas, Ramses Hutapea, dalam diskusi bertema "Menunggu 100 Hari Perubahan Pertamina" di Jakarta, Senin (23/8). "Kalau ternyata ada *mark up* dalam proyek itu, kita bisa menghukum mereka, karena merupakan tindakan korupsi," katanya.

Ditambahkan, kunci keberhasilan menggugat balik pihak KBC ada di tangan pemerintah. Apabila pemerintah jeli dan bersungguh-sungguh dalam membeberkan semua bukti dan temuan terkait dengan dugaan KKN dalam proyek Pembangkit

Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) itu, sangat mungkin klaim KBC yang kini membengkak menjadi US\$ 299 juta tersebut tidak layak dibayar.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Widya Purnama mengatakan Pertamina tetap tidak akan membayar klaim KBC. Terkait dengan kasus KBC, ditegaskan, saat ini ia telah meminta adanya audit menyeluruh terhadap proyek-proyek Pertamina.

Dia menambahkan, kini Pertamina masih menunggu hasil audit oleh akuntan independen maupun pihak Kepolisian yang telah secara intensif mengusut kasus KBC. Dia mencontohkan, berdasarkan temuan tim independen diketahui adanya penggelembungan biaya hingga hampir US\$ 20 juta, hanya untuk program kerja. Nilai itu belum ditambah dengan biaya-biaya lain yang diduga juga di-*mark up* dalam nominal yang jauh dari biaya sesungguhnya.

(H-13)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 **25** 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 11

TAHUN 2004

Sopir Tangki BBM Mogok, Distribusi Macet

Bandar Lampung, Sinar Harapan

Ratusan sopir tangki bahan bakar minyak (BBM) melakukan unjuk rasa di Depot Pertamina, Panjang, Bandar Lampung, Senin (23/8) memprotes rekan mereka yang ditahan polisi di Lampung Utara. Demo itu mengakibatkan distribusi macet di tengah kian parahnya kelangkaan BBM di Lampung.

Pada awalnya demo hanya dilakukan para sopir dan kernet tangki minyak tanah. Namun kemudian sopir dan kernet tangki solar dan bensin pun ikut ambil bagian. Mereka menolak mendistribusikan BBM sebelum Pertamina memperjelas sistem rayonisasi BBM. Alasannya, dengan tidak jelasnya sistem ini para sopir kerap jadi bulan-bulanan polisi.

Kasus terakhir terjadi, Sabtu (21/8), dua sopir tangki minyak tanah masing-masing M Umar (36 tahun) dan Mamat (30 tahun) ditangkap aparat Polres Lampung Utara ketika mendistribusikan minyak di luar wilayah rayonnya. Bersama mereka aparat juga menahan truk tangki BE 4926 AW dan BE 4991 AW.

Para pengunjung rasa menuntut kedua rekan mereka dibebaskan. "Kami minta jaminan agar tidak jadi sasaran penangkapan. Sebelum ada keputusan Pertamina dan Polda kami akan tetap mogok," ujar Markum, sopir minyak tanah.

Dalam dialog dengan para sopir, Wira Penjualan Retail V/Industri C Pertamina Depot Panjang Wahyu Riyadi menyatakan, yang membuat aturan rayonisasi bukan kepolisian melainkan Pertamina. Wahyu mengakui aturan itu sudah lama dan sering tidak dibawa sopir ketika bekerja sehingga tidak bisa diperlihatkan kepada polisi ketika diperiksa.

Menurut Wahyu, aturan rayonisasi bukan perkecamatan melainkan per kabupaten. Karena itu dia berjanji kedua sopir yang ditahan segera dilepaskan. Meski sudah mendapat jaminan, para sopir tetap menuntut Pertamina mengirim ketentuan rayonisasi yang terdapat dalam Surat

Keputusan No.194/E221150/2004-S3 kepada Polda Lampung. Jika sudah dibubuhi stempel Polda mereka

baru yakin para sopir tidak akan jadi bulan-bulanan polisi di lapangan.

Dalam pertemuan antara sopir tangki, Pertamina dan aparat Polda disepakati setiap pangkalan minyak tanah di seluruh rayon se-Provinsi Lampung harus memberikan daftar sub-pangkalan ke agen. Hal itu untuk menghindari distribusi agen ke bukan sub-agennya sehingga distribusi dan stok minyak tanah di seluruh rayon tidak merata.

Akibat unjuk rasa para sopir, sejumlah SPBU di Kota Bandar Lampung terlihat kosong hingga siang. SPBU di Jalan Diponegoro, Teluk Betung, misalnya, tidak memiliki stok solar dan bensin sejak Minggu dan baru beroperasi kembali Senin sore. Demikian pula SPBU di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Kedaton, Bandar Lampung. Pompa bensin langganan para sopir angkutan kota ini tutup sejak Senin pagi. Tampak para petugas berseragam kuning yang biasa melayani pengisian BBM asyik mengobrol karena tidak ada kegiatan. (dat)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEPT **OKT** NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 **25** 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

TAHUN 2004

BBM di Kalimantan langka

BALIKPAPAN (Bisnis): PT Pertamina mengungkapkan terjadi kelangkaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah di Kalimantan.

General Manager PT Pertamina Unit Pemasaran (UPMs) VI Iqbal Hasan menyatakan terjadinya kelangkaan pasokan BBM tersebut tidak lepas dari tingginya disparitas harga antara beberapa jenis harga BBM di wilayah kerjanya yang sangat sulit dikendalikan karena sebagian menggunakan transportasi sungai.

"Beberapa daerah di Kalimantan

seperti Kabupaten Kutai Barat telah terjadi kelangkaan pasokan BBM," katanya.

Kendati demikian dia mengatakan pihaknya tetap optimistis akan menciptakan stabilitas persediaan BBM di daerah ini, terutama dalam rangka mengamankan jalannya pemilihan Presiden RI yang kedua tahun ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, lanjutnya, Pertamina telah mengimpor secara besar-besaran minyak mentah dari luar negeri guna menjaga kestabilan persediaan BBM tersebut. (k1)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 **25** 26 27 28 29 30 31
HALAMAN : 15 TAHUN 2004

Kontribusi Sektor Migas Mencapai 25 Persen dari Total Investasi di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS — Kontribusi sektor minyak dan gas mencapai 25 persen dari total investasi di Indonesia selama tiga tahun terakhir. Hal ini juga membuat kontribusi dari sektor terkait Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral selalu melampaui penerimaan yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Informasi yang diperoleh *Kompas*, Selasa (24/8), menunjukkan investasi sektor ini meningkat dari 3,9 miliar dollar AS pada tahun 2000 menjadi 5,3 miliar dollar AS pada tahun 2003. Sementara target tahun 2004 diharapkan meningkat menjadi 7,5 miliar dollar AS.

Target investasi 2004 itu untuk kegiatan eksplorasi sebesar 799 juta dollar AS, pengem-

banagan 2,1 miliar dollar AS, produksi 3,9 miliar dollar AS, dan sisanya untuk pengeluaran administrasi. Peningkatan investasi terjadi karena semakin banyak kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

Cadangan tambah

Sementara pada sisi cadangan terdapat tambahan cadangan minyak bumi sekitar 1 miliar barrel, sedangkan cadangan gas bumi meningkat dari 123,6 triliun standar kaki kubik (TSCF) menjadi 178,13 TSCF.

Pada tahun 2003 ditandatangani 15 kontrak kerja sama migas. Jumlah itu akan bertambah tahun ini, dengan ditandatanganinya 27 kontrak kerja sama lagi.

Meski demikian, dalam tiga tahun terakhir itu juga telah

terjadi penurunan produksi minyak dari lapangan yang sedang beroperasi, rata-rata 15 persen per tahun. Namun, penurunan itu terimbangi dengan optimalisasi produksi sumur yang lain sehingga dapat menahan turunnya produksi sebesar 6 persen per tahun hingga tahun 2003.

Sementara itu, produksi gas mengalami peningkatan dari sekitar 7,3 miliar kaki kubik per hari (BCFD) pada tahun 2003 menjadi sekitar 8,8 BCFD pada tahun 2004. Produksi gas diperkirakan meningkat terus menjadi sekitar 9,5 BCFD pada tahun 2004 dan sekitar 10 BCFD pada tahun 2005.

Peningkatan didukung dengan pengembangan lapangan gas bumi di Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi.

(BOY)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 **25** 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 15

TAHUN 2004

Minyak Tanah Sulit Didapat di Kota Palu

PALU (Media): Warga Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), dalam empat hari terakhir ini mengalami kesulitan untuk memperoleh bahan bakar minyak (BBM) jenis premium.

Pemantauan *Media* kemarin, ratusan kendaraan roda dua dan roda empat terpaksa mengantre di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Palu.

Sejumlah warga mengeluhkan kondisi ini. Gara-gara harus mengantre berjam-jam, aktivitas pekerjaan mereka terganggu. Yang lebih parah, sudah mengantre berjam-jam, mereka tidak kebagian premium. "Pekerjaan saya di kantor terganggu gara-gara tidak mendapatkan premium meski sudah antre," kata Muzakir, warga Kelurahan Besusu Timur, Palu Timur.

Hal senada disampaikan Yulia, 30, warga Kelurahan Tatura, Palu Selatan. Ia sendiri mengaku tidak tahu pasti penyebab kelangkaan premium di kotanya. "Kelangkaan premium sudah terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini. Tetapi, saya tidak tahu penyebabnya," ujar Yulia.

Menurut dia, kondisi ini sering dimanfaatkan para pengecer premium dan solar dengan menaikkan harga hingga dua kali lipat dari harga sebenarnya. Untuk satu botol yang tidak mencapai

satu liter harganya bisa mencapai sekitar Rp4.000. Padahal, harga premium Rp1.810 per liter.

Kepala Depo Pertamina Palu Imam Untung, yang dikonfirmasi *Media*, menyatakan menurunnya stok di setiap SPBU disebabkan adanya penundaan pasokan premium pada sejumlah SPBU, terutama pada hari libur. "Kurang pasokan premium akibat tertundanya pasokan ke SPBU, terutama pada Sabtu dan Minggu," katanya.

Selain itu, lanjut Untung, adanya aksi borong dari sejumlah pihak yang panik jika adanya kebijakan kenaikan harga BBM. "Menurunnya stok di SPBU akibat aksi borong warga yang panik kalau-kalau harga BBM naik."

Untung menyatakan pihak Depo Pertamina Palu menjamin tidak ada lagi kekosongan persediaan di 12 SPBU di Kota Palu, karena persediaan yang ada masih mencukupi untuk kebutuhan warga Palu hingga satu minggu mendatang.

Unjuk rasa

Sementara itu dari Jayapura dilaporkan, ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Jayapura, Papua, berunjuk rasa ke DPRD setempat dan Pertamina Unit Pemasaran (UPMS) VIII, kemarin.

Aksi mereka ini dipicu akibat minyak tanah di Jayapura makin

sulit didapat. Selain itu, harganya pun cukup mahal, yakni berkisar Rp1.200 hingga Rp2.000 per liter.

Dalam aksinya, mahasiswa meminta DPRD Papua memfasilitasi pertemuan rakyat dengan Pertamina. Namun, Pertamina tidak mengindahkan panggilan itu sehingga mahasiswa melanjutkan aksi ke kantor Pertamina.

Para mahasiswa itu akhirnya diterima Kepala Penjualan Pertamina UPMS VIII Jayapura, Subaedi.

Di depan para mahasiswa, Subaedi menjelaskan bahwa kelangkaan minyak tanah ini disebabkan keterbatasan kuota minyak tanah yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Menurut dia, kuota untuk wilayah Papua, Maluku, dan Maluku Utara sebanyak 253.000 kiloliter per tahun. "Secara riil perhitungan yang dikeluarkan pihak Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). Namun, pada akhirnya ini masyarakat panik sehingga mereka membeli minyak tanah tidak sebanyak biasanya," ujar Subaedi.

Untuk mengatasi kelangkaan ini, pihak Pertamina tidak bisa menaikkan kuota, karena itu merupakan wewenang pusat. Untuk itu, ia meminta mahasiswa mengajukan aspirasinya ke pemerintah pusat. (HF/MY/N-3)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 **25** 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2004

Pemerintah Dorong Pengembangan Industri Peralatan Migas

Jakarta, NERACA

Pemerintah akan mendorong pengembangan industri peralatan pabrik minyak dan gas (migas) karena pangsa pasarnya di dalam negeri besar. "Deperindag akan meluncurkan kebijakan itu untuk mendukung pengembangan industri migas dan infrastrukturnya, kata Dirjen Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka (ILMEA) Deperindag Subagyo, di Jakarta, kemarin, Selasa (24/8).

"Sesuai dengan Keppres Nomor 18 Tahun 2000 (tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah) harus menggunakan produksi dalam negeri sesuai kemampuan industri, sehingga pasar peralatan pabrik untuk migas dan infrastruktur relatif lebih besar dibandingkan yang lainnya," katanya seperti dikutip *Antara*.

Pihaknya tetap akan mengembangkan pula industri peralatan pabrik untuk berbagai sektor lainnya yang cukup penting seperti peralatan pabrik untuk mesin pertanian (alsintan).

Berdasarkan data Ditjen ILMEA Deperindag total kebutuhan peralatan pabrik saat ini mencapai US\$ 4,6 juta, baik untuk

migas, pertambangan, infrastruktur, maupun peralatan pertanian dan industri lainnya. Deperindag memperkirakan pada tahun 2010 kebutuhan peralatan pabrik tumbuh menjadi US\$ 8,2 miliar.

Hal itu karena, ketergantungan impor bahan baku seperti pelat stainless dan baja engineering dan belum harmonisnya tarif bea masuk peralatan pabrik yang saat ini masih nol, sehingga kurang memberi insentif tumbuhnya industri peralatan pabrik di dalam negeri.

"Karena itu pula harmonisasi tarif sangat penting untuk menumbuhkan kembangkan industri di Indonesia dan kami akan terus mendorong terciptanya harmonisasi tarif antara industri hulu sampai hilir," katanya.

Saat ini industri peralatan pabrik masih sedikit dengan total investasi Rp 4,3 triliun dan pada 2003 membukukan ekspor senilai US\$ 413,6 juta.

Deperindag, dalam kebijakan industri nasional yang akan diluncurkan September 2004 mendaftarkan telah mempersiapkan sejumlah strategi pengembangan industri tersebut antara lain membangun industri pendukung peralatan pabrik di dalam negeri guna mem-

perkuat struktur industrinya.

Selain itu juga mendayagunakan pembangunan sektor migas, energi, pertambangan dan infrastruktur sebagai basis pengembangan industri peralatan pabrik dalam negeri; serta membangun aliansi antara produsen domestik dengan pemilik paten proses maupun paten peralatan.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MESDM) Purnomo Yusgiantoro menyatakan, investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) dalam 3 tahun terakhir (2001-2003) mengalami peningkatan signifikan dengan kontribusi sekitar 25%-30% dari total investasi nasional.

Investasi sektor migas naik dari US\$ 3,9 miliar pada 2000 menjadi US\$ 5,3 miliar pada 2003, dan diharapkan menjadi US\$ 7,5 miliar pada 2004. Tahun ini, investasi itu digunakan untuk kegiatan eksplorasi US\$ 799 juta, pengembangan US\$ 2,1 miliar, produksi US\$ 3,9 miliar.

Menurut Purnomo, peluang meningkatkan investasi masih besar baik di sisi hulu maupun hilir migas karena potensi yang belum tergarap masih besar. (* / 44)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : 3

TAHUN 2004

Pemerintah Dorong Pengembangan Industri Peralatan Pabrik Migas

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah akan mendorong pengembangan industri peralatan pabrik minyak dan gas (migas) karena pangsa pasarnya di dalam negeri besar.

Deperindag akan meluncurkan kebijakan itu untuk mendukung pengembangan industri migas dan infrastrukturnya, kata Dirjen Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka (ILMEA) Deperindag Subagyo, di Jakarta, Selasa. "Sesuai dengan Keppres Nomor 18 Tahun 2000 (tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Instansi Pemerintah) harus menggunakan produksi dalam negeri sesuai kemampuan industri, sehingga pasar peralatan pabrik untuk migas dan infrastruktur relatif lebih besar dibandingkan yang lainnya," ujarnya.

Pihaknya tetap akan mengembangkan pula industri peralatan pabrik untuk berbagai sektor lainnya yang cukup penting seperti peralatan pabrik untuk mesin pertanian (alsintan).

Berdasarkan data Ditjen ILMEA Deperindag total kebutuhan peralatan pabrik saat ini

mencapai 4,6 juta dolar AS, baik untuk migas, pertambangan, infrastruktur, maupun peralatan pertanian dan industri lainnya.

Deperindag memperkirakan pada tahun 2010 kebutuhan peralatan pabrik tumbuh menjadi 8,2 miliar dolar AS. Hal itu karena ketergantungan impor bahan baku seperti pelat stainless dan baja engineering dan belum harmonisnya tarif bea masuk peralatan pabrik yang saat ini masih nol, sehingga kurang memberi insentif tumbuhnya industri peralatan pabrik di dalam negeri. (Ant)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 **24** 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 4

TAHUN 2004

Presiden Akan Resmikan Anjungan Minyak Terapung Belanak

Jakarta, Sinar Harapan

Presiden Megawati Soekarnoputri akan meresmikan anjungan minyak terapung (*Floating Production Storage of Loading-FPSO*) Belanak di Kepulauan Natuna pertengahan September mendatang. Anjungan buatan China itu kini telah dipasang di Batam itu merupakan yang terbesar nomor dua di dunia.

"Lapangan minyak Belanak di Natuna dengan fasilitas FPSO itu kapal besar yang memiliki kapasitas 1,5 juta, panjangnya 300 meter. Dibuat di China, sekarang dipasang di Batam. Ini seperti di darat dan merupakan terbesar kedua di dunia. Nomor satu di Afrika," jelas Wakil Ketua BP Migas, Kardaya Wanika bersama Presdir Conocophillips dan Dirut Perusahaan Gas Negara (PGN), W.M.P. Simanjuntak ketika melapor kepada Presiden Megawati di Istana Negara, Jakarta, Senin (23/8) siang.

Pertengahan September itu, Belanak akan memiliki produksi awal (*commissioning*) sebesar 50.000 barel per hari (bph).

Dalam waktu tiga bulan, Belanak akan mencapai produksi maksimal 100.000 bph.

Menurut Kardaya, anjungan sistem FPSO itu merupakan yang paling efisien dan ekonomis. Hal itu bila dibandingkan dengan kapal maupun anjungan konvensional di tengah laut.

Bagian atas terdiri dari tiga bagian. Pertama, fasilitas produksi untuk memisahkan minyak dengan gas dan air yang selanjutnya minyak dimasukkan ke kapal untuk di-off load ke kapal tanker. Bagian kedua akan memproses elpiji 30.000 bph serta ketiga akomodasi untuk para karyawan dan operator.

Untuk itu Conocophillips menginvestasikan tidak kurang dari US\$ 800 miliar. Hasil investasi itu berupa minyak dan gas yang akan dipasarkan ke pasar domestik.

Manfaat Ganda

Di tempat yang sama Dirut PGN, W.M.P. Simanjuntak menyebutkan keuntungan penggunaan gas bumi bagi pemerintah maupun PGN mencapai US\$ 11

miliar. Keuntungan langsung kepada pemerintah US\$ 1,8 miliar ditambah pajak dan dividen dari PGN sebesar US\$ 1,4 miliar.

"Itu belum keuntungan pemakaian gas bumi daripada solar, minimal US\$ 7,5 miliar, karena manfaat ganda akan lebih besar bisa sampai US\$ 19 miliar. Masuknya gas bumi tahun 2007 bersamaan dengan bertambahnya beban APBN yang semakin berat, diharapkan impor BBM (bahan bakar minyak) bisa berkurang. Dengan demikian beban pemerintah untuk importasi bisa dikurangi dengan pemakaian gas bumi ini," ujar Simanjuntak.

Sementara itu ia menyebutkan keuntungan PGN sendiri akan mencapai 2,5 kali lipat dibanding dari sekarang. Ia menyebutkan target tahun 2004 ini akan tercapai dan pendapatan akan mengalami kenaikan 15 persen.

"Ini dikarenakan dapat tambahan gas dari sumur-sumur marjinal dan pengambilan gas oleh Singapura meningkat," tambah Simanjuntak (ega)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 (25) 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2004

**VIEW
POINT**

Gwynne Dyer
London

**Steep oil price rise:
A blessing in disguise**

Some time this week or next, oil is likely to reach US\$50 a barrel for the first time ever. The price is up by a third since the end of June, and U.S. prices have set record peaks in all but one of the past 15 trading sessions. This is a Good Thing.

It's certainly a good thing for the oil producers, who have seen the value of their oil exports eroded by the steady fall in the value of the U.S. dollar. Even at \$40 a barrel they were getting no more in real terms than they were a couple of years ago, when oil was trading in the high \$20s, but at \$50 a barrel they are actually seeing more money. It's less obviously a good thing for everybody else, but the best things often come in heavy disguise.

This isn't an "oil shock" like 1980, when the price of oil spiked at the equivalent in today's money of \$80 a barrel after the Iranian revolution, and then slid back down after a year or so. It is a "demand shock," which is a much more enduring change. Thanks mainly to the rapid economic growth of China and India, there is now a market for every barrel of oil that the producers can pump.

Future demand is likely to grow faster than future supply for exactly the same reason. Most of the growth in the global economy used to happen in the developed countries, whose economies typically grow at two or three percent a year.

Last year, almost half the growth happened in developing nations: China alone added as much demand as the United States, and India added as much as continental Europe. Those economies are growing at 7 or 8 percent annually, and there is no way that oil production can be expanded fast enough to keep up.

As a result, oil prices will fluctuate much more wildly than before. If Iraqi production is disrupted by the uprising in southern Iraq, the Deutsche Bank warned recently, "it is not unthinkable that a second disruption (loss of some exports from Russia, for example) would push prices towards \$100." If all goes well, on the other hand, the price could be back down in the low \$30s by this time next year. But it is unlikely to see the \$20s again.

Ever since 2000, the Organization of Petroleum-Exporting Countries (OPEC) has tried to keep the price of oil in the \$22-\$28 range, cutting production if it fell below that band and increasing output if it climbed above it. Now it has been well above that band for six months. "Our ministers realize they need to revise the price band, particularly given the changing value of the dollar," said OPEC spokesman Abdul al-Khereigi last week - and speculated that the new band would be \$25-\$30 or even \$26-\$32.

The price of oil may never actually fall back that far again, and even if it does the long-term trend is clearly up. Why is that a Good Thing?

The main reason is global warming, which is coming on faster and harder than even the pessimists feared. In a system as complex as climate, all sorts of things change in unpredictable ways when you raise the total amount of heat in the system, and the worst changes are those that set up feedback mechanisms. Some of the changes we are observing now are very worrisome.

It was assumed, for example, that the rise in global temperature would be partly canceled out by a higher rate of evaporation from the oceans that produced more cloud cover. Instead, the higher temperatures seem to be burning the clouds off. And recent research suggests that the higher level of carbon dioxide in the atmosphere is stimulating the bacteria that live in peat bogs and greatly increasing the speed with which they dissolve the peat. The peat is almost pure carbon, and when it dissolves it turns into - carbon dioxide.

If that turns out to be an runaway feedback loop, we are in serious trouble, for the peat bogs of the northern hemisphere contain the equivalent of 70 years' worth of global industrial emissions of carbon dioxide. New calculations suggest that we may be facing a global temperature rise over the next century not of 5.8 degrees Centigrade (10.6 degrees Fahrenheit), which would be bad enough, but as much as 10-12 degrees C (18-21 degrees Fahrenheit).

That would be calamitous, but key players in the world of politics and most of the business world (apart from

the insurance industry) remain in denial.

The Kyoto accord is a good template for the global regulation of greenhouse gases, but the actual cuts in carbon dioxide production that it envisages do not begin to address the problem.

The only short-term hope of slowing the rise in temperature is a steep drop in the use of oil and gas - and the only thing that is going to make that happen is a steep rise in price.

It has happened before. Alternative energy sources take a long time to build, but energy conservation works relatively quickly. The big oil price rises of the 1970s caused the industrialized countries to bring in energy conservation measures that cut global oil consumption drastically. Twenty-five years of profligacy in energy use since then means that there is once again huge scope for rapid gains from conservation. It will only happen, however, if the oil price goes up and stays up.

The writer is a London-based independent journalist.

42